



1-1 NOV 2003

54



LAPORAN PENELITIAN  
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2001

**MILITANSI GERAKAN PRO GUS DUR DALAM DINAMIKA POLITIK  
DAN DEMOKRATISASI**

(Studi Sosiologi Politik Tentang Pemahaman Terhadap Demokrasi,  
Civil Society dan Kaitannya Dengan Militansi Pro Gus Dur  
di Banyuwangi, Jawa Timur)

Peneliti:

Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil.  
Drs. MUSTAIN MASHUD, M.Si.  
Drs. SEPTI ARIADI, M.A.  
Dra. SITI AMINAH, M.A.

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2001  
SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 5307/JO3/PG/2001  
Tanggal 12 Juni 2001  
Nomor Urut: 24

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001

ACTIONS AND DEFENSES

KKB

KK-2B

306.2

Mil



LAPORAN PENELITIAN  
DIK RUTIN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2001

## MILITANSI GERAKAN PRO GUS DUR DALAM DINAMIKA POLITIK DAN DEMOKRATISASI

(Studi Sosiologi Politik Tentang Pemahaman Terhadap Demokrasi,  
Civil Society dan Kaitannya Dengan Militansi Pro Gus Dur  
di Banyuwangi, Jawa Timur)

Peneliti:

Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil.  
Drs. MUSTAIN MASHUD, M.Si.  
Drs. SEPTI ARIADI, M.A.  
Dra. SITI AMINAH, M.A.

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

3000123033141

**LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun 2001

SK Rektor Universitas Airlangga Nomor 5307/JO3/PG/2001

Tanggal 12 Juni 2001

Nomor Urut: 24

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Desember, 2001



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**





- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional         | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional             | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722)      | 10. Puslit/ Kesehatan Reproduksi                 |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum (5923584) | 7. Puslit Olah Raga                   |  |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718)   | 8. Puslit Bioenergi                   |  |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5962066  
E-mail : lpunair@rad.net.id - http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

3000123033141

IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Militansi Gerakan Pro Gus Dur Dalam Dinamika Politik Dan Demokratisasi (Studi Sosiologi Politik Tentang Pemahaman Terhadap Demokrasi, Civil Society dan Kaitannya Dengan Militansi Pro Gus Dur Di Banyuwangi, Jawa Timur)
- b. Macam Penelitian : ( ) Fundamental, ( V ) Terapan, ( ) Pengembangan
- c. Katagori Penelitian : ( ) I ( V ) II ( ) III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Wahyudi Purnomo, M.Phil.
- b. Jenis Kelamin : Laki - Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP : Asisten Ahli / 131 453 819
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Politik
3. Jumlah Tim Peneliti : 4 (Empat) orang
4. Lokasi Penelitian : Banyuwangi
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : Rp 3.000.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 14 Juni 2002
- b. Hasil Penelitian : ( ) Baik Sekali ( V ) Baik  
( ) Sedang ( ) Kurang



Surabaya, 14 Juni 2002

Mengetahui/Mengesahkan :  
a.n. Rektor  
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. H. Sarmanu, M.S.  
NIP. 130 701 125

## Abstract

Why were the '*Nahdliyin*' people in East Java regarded militant in defending Gus Dur when he was about to be dropped from the presidency chair ?

This study found out that in the viewpoint of the *Nahdliyin*, Gus Dur was not only the head of a state and country, the president of Indonesia, but also the '*NU*' president or '*Kyai*' president. In this context, besides functioning as a symbol of a country, Gus Dur was also a symbol of NU so that it was obligatory to defend the honor of the head of a state, country, and religion who were being treated unfairly without any substantial reason. The only reason, which developed at that time, was that given by some groups with certain political interests.

The '*Nahdliyin*' people are generally supportive. In fact, they demand the realization of democratic values and civil society into the political and societal life, because both democratization movement and civil society are highly pertinent with the '*kaifiyah*' of the Prophet Muhammad, as he formed the '*madaniyah*' people in Madinah.

There is a correlation, which is quite significant, between the role of religious leader and an effort of establishing civil society.

Is the militancy of movement in defending Gus Dur done by the '*NU*' community influenced and justified by their religious values ? Or, how could the movement turn into 'anarchical' while the NU organization was known as a flexible, dialog-oriented, and tolerant social-religious organization ?

## Abstrak

**Mengapa warga nahdliyin Jawa Timur dinilai cukup militan membela Gus Dur ketika beliau hendak dijatuhkan dari kursi presiden?**

Studi ini menemukan bahwa dalam pandangan warga nahdliyin Gus Dur tidak hanya sebagai pemimpin bangsa dan negara, Presiden RI, melainkan juga Presiden yang NU atau Kyai yang presiden. Dalam konteks demikian, Gus Dur selain simbol negara, juga simbol NU sehingga wajib hukumnya membela kehormatan pemimpin bangsa, negara dan agama yang sedang didholimi tanpa alasan yang substansial, tetapi lebih didorong oleh alasan kepentingan politik kelompok tertentu.

Sementara itu, warga nahdliyin umumnya sangat mendukung dan bahkan mewajibkan untuk direalisasi nilai-nilai demokrasi dan *civil society* ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Sebab gerakan demokratisasi dan *civil society* sesungguhnya sangat sesuai dengan *kaifiyah* nabi Muhammad sebagaimana dicontohkannya ketika nabi membentuk masyarakat madaniyah di Madinah.

Ada korelasi yang sesungguhnya cukup signifikan antara peran tokoh agama dan upaya mewujudkan masyarakat mafani (*civil society*).

Apakah militansi gerakan membela Gus Dur yang dilakukan komunitas NU tersebut dipengaruhi dan *dijustificasi* oleh nilai-nilai keagamaan mereka? Atau, bagaimana gerakan membela Gus Dur tersebut sampai terjadi "anarkis" sementara organisasi NU dimana mereka menjadi umatnya umumnya sangat dikenal sebagai organisasi sosial-keagamaan yang fleksibel, toleran dan lebih mengedepankan dialog?

## Kata Pengantar

Studi dilakukan dalam rangka mengetahui alasan di balik “kenekatan” para pendukung Presiden Gus Dur yang dimata “orang luar” dinilai sebagai keanehan dan bahkan berlebihan. Meskipun ada sebagian yang bisa mengerti dan memahami, namun sebagian besar yang lain banyak yang menilai sebagai bentuk dukungan berlebihan dan terkesan belum siap berdemokrasi.

Peneliti mengakui sepenuhnya kalau hasil peneliti ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Proses peroleh data sudah diupayakan maksimal dengan memanfaatkan momentum-momentum tertentu, seperti forum seminar, diskusi, rapat-rapat atau acara-acara pertemuan lain. Model pengumpulan data seperti ini boleh jadi mempunyai kelebihan, sebab peneliti selain bisa melakukan wawancara, juga bisa mengamati secara langsung proses diskusi interaktif sehingga informasi yang diperoleh lebih komprehensif.

Peneliti berharap ada peneliti lain yang berupaya meneruskan menggali persoalan serupa dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan yang lebih lanjut. Semoga penelitian sederhana ini bermanfaat

Surabaya, Juni 2002  
Peneliti

## Daftar Isi

	Hlm
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Perumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	7
4. Telaah Pustaka	9
5. Metodologi	17
 <b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	 20
 <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
1. Latar Belakang Membela Presiden Gus Dur	41
2. Pandangan Terhadap Demokrasi dan Civil Society	49
3. Pengalaman Berorganisasi dan Militansi	63
 <b>BAB IV : PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan	71
2. Rekomendasi	72

### **Kepustakaan**



## BAB I

### PENDAHULUAN

---



#### 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu fenomena yang patut diperhatikan dalam proses demokratisasi pasca Orde Baru adalah adanya kontradiksi-kontradiksi yang tengah berlangsung di masyarakat. Di satu sisi ada dorongan kuat untuk menegakkan demokratisasi melalui pemberdayaan dan atau penguatan masyarakat sipil. Namun, pada saat yang sama juga tengah berlangsung pemaksaan-pemaksaan kehendak tanpa memperhatikan kepentingan orang lain sehingga justru mengorbankan semangat demokratisasi itu sendiri. Apa yang tengah terjadi pada masyarakat yang tengah bertransisi ini bisa jadi memang sedang mengalami pergulatan nilai, bentuk dan model melalui proses sosial yang panjang menuju ke tatanan sosial yang demokratis ataukah justru membuahkan suatu masyarakat yang bertatanan penuh kekerasan; kacau dan anarkisme.

Fenomena Pasukan Berani Mati (PBM) pendukung Gus Dur yang belakang ini marak setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, pemahaman demokrasi masih kurang baik sehingga

cara-cara non-demokratis yang lebih menonjol dalam menyampaikan aspirasi. Kedua, persepsi masyarakat terhadap perilaku politik –yang dalam banyak kali menyatakan diri sebagai demokratis-- itu sendiri yang perialakunya justru bertentangan dengan semangat demokrasi, atau setidaknya dinilai melawan nilai-nilai demokrasi oleh masyarakat, khususnya oleh para pendukung Gus Dur. Dengan kata lain, tengah berkembang pemahaman dikalangan pendukung Gus Dur di Jawa Timur bahwa manuver-politik yang dilakukan lawan Gus Dur bukannya menegakkan demokrasi dengan baik dan benar, melainkan memanfaatkan demokrasi untuk menjatuhkan Gus Dur sebagai Presiden.

Dari beberapa diskusi yang peneliti ikuti terlihat bahwa mereka juga melihat persoalan konflik politik antara Gus Dur sebagai presiden dan kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan, umumnya banyak dipahami tidak hanya sebagai arena pertarungan politik dalam memperebutkan kekuasaan, melainkan juga pertarungan dan atau pertarungan nilai dan identitas kelompok antara NU dan non NU (Muhammadiyah, Golkar dan kelompok-kelompok Islam garis keras). Jika ini benar, maka persoalan yang bakal muncul akan semakin rumit

hanya dan bukan lagi kebenaran formal yang tentatif, melainkan kebenaran keyakinan yang mutlak dan karena itu mempengaruhi semangat dan militansi dalam gerakannya. Kondisi perpolitikan seperti ini sungguh menjadi persoalan sekaligus tantangan dalam era kebebasan masyarakat sipil (civil society).

Pada hal kehidupan masyarakat sipil (civil society) akan selalu ditandai oleh (1) adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan (civic groups), institusi keagamaan dan organisasi massa keagamaan yang mandiri, (2) menguatnya prinsip pluralisme, (3) berkembangnya sikap toleran, (4) meningkatnya pemahaman atas hak-hak azasi manusia dan (5) meluasnya perhatian terhadap peraturan (rule of law) yang ada.

Indikator masyarakat sipil adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan (civic groups) yang mandiri – institusi-institusi keagamaan dan organisasi sosial keagamaan yang mandiri. Hal ini seiring dengan visi yang acap dikemukakan para tokoh agama bahwa agama harus mampu menjadi “energi kekuatan masyarakat”. Agama menjadi strategis untuk pemberdayaan masyarakat sipil disebabkan oleh kemandiriannya. Jika agama tidak bisa mandiri maka ia akan justru dan atau mencerminkan lemahnya masyarakat sipil. Karena itu, kondusifitas

perkembangan dan eksistensi masyarakat sipil (civil society) akan sangat tergantung dari tingkat kemandirian agama.

Sebagaimana diketahui selama orde baru kekuatan dan kekuasaan negara begitu kuat dan mendominasi berbagai aspek dan unsur kehidupan termasuk kehidupan beragama. Hampir semua institusi sosial, politik, budaya dan agama dikuasai melalui politik kooptasi dan hegemoni negara. Posisi dan peran agama banyak telah terdesak sekedar menjadi legitimizer agenda-agenda kekuasaan dan program-program pembangunan. Sebagai akibatnya institusi agama dibuat tak berkutik menghadapi kekuatan negara sehingga menyebabkan institusi agama tidak bisa mandiri dan bahkan banyak bergantung dan menggantungkan diri kepada negara. Jangankan fungsi penyeimbang, agama-agama bahkan belum bisa memainkan fungsi reflektifnya dalam berhadapan dengan kekuasaan – misalnya mengontrol kekuasaan berdasarkan prinsip tasharruf al-imam 'ala 'l-raiyyah manuthun bi 'l-mashlahah (pengelolaan kekuasaan atau administrasi kepemimpinan harus ditundukkan kepada kemaslahatan bersama, common good) (Falakh, 1999).

Dengan demikian agama diharapkan akan mampu memberikan inspirasi etis-universal dalam pemberdayaan

*Militansi Pendukung Mantan Presiden Gus Dur*

terbatas dan secara sempit pada 'umat' nya sendiri. Kerjasama antar golongan dan atau antar umat beragama selain akan sangat kondusif menciptakan keterbukaan dan toleransi, juga akan berarti mengurangi fragmentasi. Jika terjadi fragmentasi antar sesama masyarakat sipil akibatnya sangat berbahaya, sebab sangat rentan terhadap intervensi negara dan absolutisme kekuasaan. Memperhatikan kenyataan demikian, maka agama-agama sudah mendesak dan akan sangat strategis melibatkan diri dalam pekerjaan kultural-transformatif agama sehingga agama akan menjadi bagian dari kekuasaan sosio-kultural yang memberi landasan bagi bekerjanya sistem politik yang demokratik (Falakh, 1999).

Studi civil society di Indonesia kian penting, karena (1) persoalan ini untuk konteks Indonesia masih dalam taraf awal sehingga masalah ini masih memerlukan rekonstruksi, penambahan dan bahkan dekonstruksi atas pikiran-pikiran yang sudah ada, baik dari Barat ataupun yang kini dicoba kembangkan di Indonesia; (2) Indonesia menghadapi struktur yang hampir sama yang terjadi di negara-negara totaliter dimana negara begitu berkuasa dengan kuat, sampai mengurus hal-hal yang sangat pribadi (Hikam, 1999).

## **2. PERUMUSAN MASALAH**

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memahami berbagai respon dinamika dan proses-proses sosial yang terjadi dalam komunitas NU wilayah Jawa Timur, khususnya para pendukung Gus Dur yang fanatik dan militan. Pertanyaan penting di sekitar tema ini berhubungan dengan isu tentang bagaimana keseluruhan aspek sosial, kultural, ekonomi, demografi dan politik yang melekat dalam struktur hubungan kekuasaan lokal di dalam masyarakat Jawa Timur --yang selama ini memang menjadi "pusat" NU di Indonesia-- semestinya dipahami sebagai sebuah transformasi yang digerakkan oleh dinamika internal dan berbagai driving forces yang terdapat dalam ruang nasional dan global.

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- 1) Mengapa warga Jawa Timur, khususnya komunitas NU yang mendukung Gus Dur, membela mati-matian terhadap eksistensi Gus Dur Sebagai Presiden RI? Betulkah para pendukung Gus Dur tersebut masih memandang Gus Dur sebagai representasi dan atau manifesasi simbol-simbol kultural identitas ke-NU-an mereka?



- 2) Bagaimana pandangan mereka terhadap demokrasi dan civil society (masyarakat madani) yang kini tengah menjadi wacana dan gerakan di masyarakat? Termasuk disini bagaimana persepsi mereka tentang suatu kritik terhadap pemimpin, termasuk presiden? Tolok ukur apa suatu kritik disebut sebagai "kritik" dan kapan suatu kritik dianggap sebagai hujatan dan bahkan ada niatan menjatuhkan?
- 3) Apakah ada kaitan antara pengalaman dalam organisasi sosial keagamaan dan militansi gerakan membela Gus Dur yang dilakukan komunitas NU?
- 4) Bagaimana posisi dan peran para tokoh masyarakat dan atau tokoh agama dalam membangun civil society dan demokratisasi? Benarkah para pemuka agama yang ada bisa mendorong dan mempercepat civil society dan demokratisasi?.

### **5) 3. TUJUAN PENELITIAN :**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

- 1) Latar belakang, mengapa warga Jawa Timur, khususnya komunitas NU yang mendukung Gus Dur, membela mati-

- 2) pandangan mereka terhadap demokrasi dan civil society (masyarakat madani) yang kini tengah menjadi wacana dan gerakan di masyarakat; termasuk disini untuk mengetahui persepsi mereka tentang suatu kritik terhadap pemimpin, termasuk presiden; tolok ukurnya apa suatu kritik disebut sebagai "kritik" dan kapan suatu kritik dianggap sebagai hujatan dan bahkan ada niatan menjatuhkan.
- 3) Ada-tidaknya pengaruh antara pengalaman dalam organisasi sosial keagamaan dan militansi membela Gus Dur.
- 4) Mengetahui latar belakang militansi gerakan membela Gus Dur yang dilakukan komunitas NU sampai banyak disebut orang sebagai "anarkis" sementara organisasi NU dimana mereka menjadi umatnya umumnya sangat dikenal sebagai organisasi sosial-keagamaan yang fleksibel, toleran dan lebih mengedepankan dialog

**MANFAAT PENELITIAN :**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat tidak saja untuk pengembangan wawasan dan wacana ilmu pengetahuan,

diharapkan bisa memberikan informasi yang memadai tentang persoalan yang diteliti sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan informasi yang akurat dan memadai sesuai dengan realitas di lapangan diharapkan hasil studi ini bisa memberikan pencerahan bagi semua kalangan tentang bagaimana sebetulnya proses sosial yang tengah terjadi dalam masyarakat arus bawah tentang transformasi internal dan eksternal, khususnya dalam kaitannya dengan percaturan politik baik ditingkat lokal maupun nasional

#### **4. PENELAAHAN STUDI KEPUSTAKAAN**

Pemahaman pokok tentang masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat yang sedang mengalami transisi, khususnya dari rejim otoritarian ke rejim yang lebih demokratis, sebagaimana dipahami oleh para ahli sosiologi politik seperti O'Donnell dan Schmitter (1986), Huntington (1991), Zalaquett (1989), dan Goodwin and Nacht (1995) akan dipakai sebagai salah satu point of departure untuk memahami kecenderungan global pasca-perang dingin yang dialami banyak negara bangsa (nation state) belakangan ini. Analisis yang lebih bersifat lokal yang disumbangkan oleh banyak penulis tentang Orde Baru dan

dipakai untuk memperkaya pemahaman terhadap proses itu (Budiman, 2000; Heryanto, 1993, 1996; Sparringa, 1998, 1999, 2000b; Pabongtingi, 1999).

Sementara itu, telaah perkembangan civil society di masyarakat majemuk yang tengah mengalami perubahan yang ditandai oleh munculnya antagonisme dan konflik sosial yang berdimensi etnik, rasial, agama, provinsialisme dan semacamnya yang juga melibatkan kekerasan akan dibahas untuk menemukan ada tidaknya pola-pola umum di samping yang khusus dalam proses itu (Roberts, 1991; Neocleous, 1995, Steger and Lind, 1999). Termasuk di dalamnya adalah munculnya berbagai protest movement yang diorganisasikan oleh komunitas-komunitas lokal. Dalam konteks teoritis semacam inilah, konsep-konsep dasar yang menjelaskan berbagai bentuk resistensi etnis, rasial, dan religius, termasuk yang melibatkan tindakan-tindakan kekerasan, terutama yang dilakukan secara kolektif, menjadi penting untuk dirujuk. Dalam bentuk yang lebih luas, seluruh analisis tentang konflik, integrasi dan disintegrasi, baik yang disumbangkan oleh para penganut aliran struktural Marxis maupun struktural fungsional, menjadi relevan untuk dibahas sebagai salah satu kerangka yang

ideologi dan para elit dalam kompetisi sumber-sumber kekuasaan dan perjuangan ideologis dalam perspektif makro maupun mikro, akan dipakai sebagai alat analisis data (Giddens, 1995; Turner, 1996).

Masyarakat secara umum berkecenderungan bergerak secara dinamis dan kemudian akan berubah. Perubahan sosial yang terjadi memungkinkan masyarakat yang semula sangat sederhana karena urbanisasi, industrialisasi, mobilitas penduduk, perpindahan agama, interaksi antar etnis dan menguatnya birokrasi-militer kemudian akan mengalami perbesaran struktur sosial secara vertikal (social gap) maupun horisontal (social differentiation). Kian melebarnya jarak sosial vertikal dan horisontal ini secara tak terelakkan akan menyebabkan ketidakpuasan-ketidakpuasan (konflik laten) baik pada tingkat individu, komunitas maupun masyarakat. Situasi demikian pada gilirannya akan menghasilkan kerawanan-kerawanan terhadap konflik dan kerusuhan yang bereskalasi sangat besar. Dengan kata lain masyarakat yang tengah mengalami perubahan sosial dengan cepat akibat pembangunan menyebabkan kian tercerai-berainya ikatan-ikatan tradisional (malintegration).

Sehubungan dengan kecenderungan disintegrasi seperti

penguatan organisasi-organisasi lokal dan budaya. Pada tingkatan ini posisi dan peran pemuka masyarakat dan agama cukup signifikan. Sementara itu, pada tataran organisasi perlu diusahakan agar masyarakat bisa terlibat (dan dilibatkan) dalam berbagai organisasi baik politik, sosial, komunitas, maupun keagamaan yang bersifat inklusif vertikal dan horisontal sehingga memungkinkan terbangunnya suatu pola solidaritas antar etnis, antar golongan dan antar agama, cross-cutting affiliation.

Untuk penciptaan situasi yang kondusif terhadap berlangsungnya solidaritas organis diperlukan peran pemimpin lokal, regional maupun nasional yang memahami kondisi dan situasi masyarakat lokal. Namun, baik pemimpin lokal, regional dan nasional dalam prosesnya bisa fungsional, malfungsional, maupun disfungsional. Artinya, pemimpin bisa berfungsi sebagai pencegah, pemicu maupun peredam dan penghenti kerusuhan sosial baik yang bersifat politik, agama dan etnik (YISS, 1999). Namun demikian, berbagai kasus juga menunjukkan bahwa konflik sosial juga acap bersumber dari para tokoh lokal terlepas dari latar belakang penyebabnya.

Fenomena dinamika sosial destruktif (konflik-konflik



dapat pula dilihat kaitannya dengan peran negara terutama dalam menjaga keamanan nasional dan disintegrasi bangsa. Hubungan negara dan rakyat yang selama orde baru cenderung antagonistik merupakan entry point yang sangat tepat untuk melihat adanya kekuasaan negara yang otoriter. Negara –baik sengaja atau sebagai sesuatu konsekuensi ikutan yang tak terhindarkan akibat suatu kebijakan—terkesan meninggalkan rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya indikasi bahwa praktek totalitarianisme negara merupakan pengejawantahan kepentingan pribadi sebuah rezim dengan membangun sebuah sistem yang sentralistik (Putra, 1999).

Dennis A Rondinelli (1981) mengemukakan bahwa politik sentralistik lebih banyak membawa pada kondisi anti demokrasi. Kondisi-kondisi tersebut adalah (1) seringnya rencana-rencana pemerintah tidak diketahui oleh masyarakat di tingkat bawah, pada hal bila mengacu pendapat de Janvry maka sebenarnya setiap tindakan pemerintah itu adalah berkenaan dengan kepentingan rakyat, jadi bila rakyat sudah tidak mengerti akan apa yang sedang dilakukan pemerintahnya, maka pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkaran kehendak rakyat oleh pemerintah, penguasa (1983); (2) Lemahnya dukungan elit

masyarakat dan (4) tidak dapat memotong red tape prosedur politik dan administrasi yang panjang. Problem dalam negara sentralistik seperti ini telah menyebabkan frustrasi pejuang demokrasi sehingga di masyarakat acap kita dengar bagaimana para demonstran atau mereka yang tidak menyetujui keputusan pemerintahan lokal hanya mendapat jawaban bahwa "Kami (para pemerintah lokal itu) hanya menjalankan perintah atasan", atau "Baiklah aspirasi Saudara akan Kami teruskan ke pusat" hingga beberapa lama sampai isu tersebut mengendap dan kemudian terlupakan. Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan selama 32 tahun tidak terlepas dari model seperti itu.

Ketiadaan kekuatan yang nyata dalam masyarakat sipil (civil society) sesungguhnya merupakan fenomena umum sejarah politik Indonesia. Secara ekstrim bahkan dapat dikatakan bahwa, negara (state) lebih dulu hadir sebelum masyarakat (civil society)—sesuatu yang sangat janggal jika dibandingkan dengan sejarah lahirnya negara di masyarakat Barat. Walaupun terjadi variasi intensitas yang menjelaskan pertumbuhan civil society di Indonesia (cukup menonjol di tahun 1950-an, surut dalam era Demokrasi Terpimpin, dan kemudian

bahwa Negara merupakan unsur dominan dalam perkembangan itu. Fenomena ini sangat menonjol dalam era Orde Baru yang lahir segera setelah runtuhnya rejim Soekarno

Diawali dengan operasi pembersihan PKI dan ormas-ormas yang mendukungnya, pelarangan ajaran komunis, Orde Baru segera secara sistematis melakukan penghancuran 'politik massa', 'politik aliran', termasuk bahkan organisasi-organisasi yang secara aktif berpolitik bersama-sama dengan Angkatan Darat menghancurkan komunisme. Nahdatul Ulama (NU) merupakan pengecualian—sebuah organisasi Islam dengan massa terbesar yang dapat bertahan justru karena menguasai forum dan media tradisional yang tidak dapat disentuh oleh negara (misalnya yasinan, pengajian, dzibaan, istighotsah. Sebuah politik yang dalam berbagai kesempatan sering saya sebut dengan politik 'depolitisasi massa'<sup>1</sup>. Langkah ini segera disusul dengan penyederhanaan partai di awal 1970-an, penerbitan lima Undang-undang Politik termasuk penetapan Pancasila sebagai 'satu-satunya asas' pada pertengahan 1980-an. Apa yang dilakukan Orde Baru sebenarnya tidak saja mempersempit 'ruang gerak' tetapi juga 'ruang diskursus' politik.

Dalam melihat persoalan civil society, perlu digunakan 2 tataran, pertama, tataran institusional-sosiologis dan kedua tataran ideal menyangkut visi. Akar civil society di Indonesia sudah ada, seperti lembaga-lembaga intermediary sekalipun masih sangat sederhana antara masyarakat dan negara, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Yang perlu dikembangkan pada lembaga ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuannya agar lebih rasional sehingga bisa membangun dan mengembangkan jaringan dengan kelompok-kelompok lembaga lain. Lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah adalah contoh akar-akar dari civil society (Hikam (1999)).

Pada tataran visi, barangkali agak mengalami kesulitan. Sebab, visi dari civil society menuntut adanya kesediaan menyerap nilai-nilai dari Barat (seperti Enlightenment, rasionalitas, sekularisasi dan nilai-nilai demokrasi yang sangat humanitarian) yang dalam banyak hal masih dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal (agama). Harus diakui memang ada perbedaan-perbedaan, namun –agar produktif—yang dicari adalah persamaan-persamaannya, seperti prinsip enlightenmen dicarikan persamaan dengan prinsip al-ushul al-khamsah dalam

terjadi adalah sinergi antara Islam (lokal) dan Barat. Karena itu upaya mengembangkan masyarakat madani seperti jaman nabi akan menutup kemungkinan terjadi sinergi dan pencangkakan pada hal kondisi riil di masyarakat sangat heterogen.

Sementara itu, berbicara tentang civil society berarti perlu memperhatikan enlightenmen, dan ini berarti juga perlu membicarakan sekularisasi. Pada hal sampai kepada civil society diperlukan pencerahan pada lembaga-lembaga tradisionalnya tanpa meninggalkan akar-akarnya. Pada tataran institusi tradisional (seperti pesantren, Subak, Lumbung Desa) ada 2 level, yakni visi dan institusi.

Secara umum konsep Civil Society bermakna (tersirat) bahwa suatu rejim berhak menjalankan otoritasnya di atas wilayah dan warga negara yang berada di dalam kekuasaannya setelah pemerintah mendapatkan legitimasinya dari warga negara atau penduduknya. Sebaliknya, warga negarapun berperan aktif di dalam politik dengan menjalankan fungsi check and balance bagi pemerintah baik melalui legislatif maupun LSM.

## **6. METODE PENELITIAN :**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

pemikiran pokok yang menempatkan realitas sosial sebagai hasil dari bekerjanya proses interpretatif individu atas struktur yang di dalamnya melibatkan berbagai proses pemaknaan subyektif dan inter-subyektif (Collin: 1997). Konsekuensi ikutan dari penelitian bermetodekan kualitatif seperti ini antara lain adalah determinasi terhadap upaya memahami realitas dari perspektif subyek. Karena itu, faktor kedalaman (depth), kekayaan (richness) dan kompleksitas (complexity) atas sebuah makna sangat dikedepankan (Azevedo, 1997).

Lokasi penelitian dilakukan Banyuwangi, Jawa Timur. Sebab, di daerah inilah selain cukup banyak massa pro Gus Dur yang dikenal cukup fanatik dan militan, juga sebagai lokasi latihan dan atau pengemblengan Pasukan Berani Mati (PBM).

Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan merujuk pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang dinilai banyak mengetahui tentang perilaku warga nahdliyin pendukung presiden Gus Dur.

Dalam penelitian berhasil ditemui setidaknya 9 informan, yang terdiri atas 2 putra kyai (ulama) atau lazim sering disebut "Gus", 4 orang "aktifis" pendukung Gus Dur yang banyak terlibat dalam



kegiatan demonstrasi di Banyuwangi dan 3 orang pemuda dan pemudi anggota Banser dan Fatayat.

Data yang terkumpul dan analisis dan diolah sesuai dengan sifat dan karakteristik data. Karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, maka analisis dilakukan dengan cara memerikan opini, pemahaman dan wacana-wacana dari informan yang diwawancarai. Asumsinya, pemahaman, opini dan wacana yang mereka bangun tidaklah muncul secara naluriah dari dalam diri mereka secara personal, melainkan sebagai hasil dari proses interaksinya dengan perkembangan kondisi eksternal.

Data seperti itulah yang kemudian dikemukakan secara naratif, yakni berupa uraian-uraian mendalam dari informan tentang fenomena aktifitas yang mereka lakukan, dalam hal ini adalah aktifitas mendukung presiden Gus Dur.

## Bab II

### Gambaran Kabupaten Banyuwangi

---

#### 2.1. Keadaan Geografi

Banyuwangi, adalah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Jawa Timur yang paling timur. Kabupaten Banyuwangi dengan luas 5.782,50 km<sup>2</sup> adalah kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terluas terletak diantara 70°43' - 80°46' lintang selatan dan 113°53' - 114°38' bujur timur. Kecamatan Tegaldlimo merupakan kecamatan yang mempunyai daerah terluas, yaitu: 1.341,49 km<sup>2</sup> atau 23,20 persen dari luas Kabupaten Banyuwangi dan Kecamatan Banyuwangi merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 30,13 km<sup>2</sup> atau 0,52 persen dari luas Kabupaten Banyuwangi. Gunung Argopuro dengan ketinggian 3.808 meter, adalah gunung yang tertinggi di Kabupaten Banyuwangi dan sungai Baru merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Banyuwangi, yaitu: 80,70 km.

Suhu udara di Banyuwangi pada tahun 1999, menurut catatan Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Banyuwangi, berkisar antara 22,7 - 32,2 derajat *celcius*, dimana

yang tertinggi di bulan Nopember 1999, bila dibandingkan dalam keadaan tahun 1998 yang berkisar antara 23,9 - 32,6 derajat *celcius*, maka suhu pada tahun 1999 relatif masih sama.

Banyuwangi berbatasan dengan:

- » Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso
- » Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- » Sebelah Timur : Selat Bali
- » Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

Kabupaten Banyuwangi terbagi ke dalam 21 kecamatan, yaitu: kecamatan Banyuwangi, Cluring, Bangorejo, Gambiran, Genteng, Glenmore, Kabat, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Rogojampi, Singojuruh, Srono, Sempu, Tegaldimo, Kalibaru, Giri, Glagah, Songgon dan Wongsorejo. Sebagian besar (14 kecamatan) daerah ini merupakan dataran rendah atau landai dan tepian pantai.



## 2. Keadaan Penduduk

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa penduduk kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari hasil sensus penduduk tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, jumlah penduduk meningkat sebesar 2,42 persen, yaitu dari

Jika dilihat dari sebaran penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin diketahui bahwa pada tahun 1999 jumlah penduduk terbesar terdapat pada kelompok umur 15-44 tahun dengan jumlah penduduk sebanyak 732.826 jiwa yang terdiri dari 354.001 laki-laki dan 378.825 perempuan (lampiran tabel 2). Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur kurang dari 1 tahun yaitu sebesar 1,29 persen dari jumlah penduduk dari semua kelompok umur, dengan jumlah 19.638 jiwa yang terdiri dari 9.943 laki-laki dan 9.695 perempuan. Untuk jumlah penduduk keseluruhan dari semua kelompok umur terdiri dari 750.344 laki-laki dan 773.709 perempuan.

### **3. Banyaknya Angka Kematian**

Dari tabel 2. dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian terbesar di kabupaten Banyuwangi terjadi pada tahun 1998, dengan berjumlah 6.064 jiwa penduduk yang mengalami peningkatan sebesar 6,49 persen dari tahun sebelumnya yaitu 5.694 penduduk. Kemudian pada tahun 1999 mengalami penurunan dari tahun 1998 sebesar 22,47 persen, sehingga pada tahun 1999 jumlah kematian sebesar 4.701 jiwa. Kematian

**Tabel:2 BANYAKNYA KEMATIAN YANG TERCATAT MENURUT  
KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1990**

<i>Kecamatan</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pasanggrahan	182	111	203
2. Bangorejo	64	55	119
3. Purwoharjo	46	38	84
4. Tegaldlimo	124	126	250
5. Muncar	93	58	151
6. Cluring	130	86	216
7. Gambiran	89	72	161
8. Glenmore	45	27	72
9. Kalibaru	60	40	100
10. Genteng	199	172	371
11. Srono	76	50	126
12. Rogojampi	198	149	347
13. Kabat	28	60	142
14. Singojuruh	153	129	282
15. Sempu	182	182	364
16. Songgon	82	60	142
17. Glagah	78	55	133
18. Banyuwangi	335	402	737
19. Giri	122	152	274
20. Kalipuro	172	183	355
21. Wongsorejo	45	34	79
<i>Jumlah 1999</i>	2.503	2.198	4.701
1998	3.347	2.717	6.064
1997	3.165	2.529	5.694

terbesar terjadi di kecamatan Banyuwangi (737 jiwa)

Hal ini mungkin bisa diartikan berhubungan dengan kasus pembunuhan dukun santet yang terjadi pada tahun 1998. Pada kasus pembunuhan dukun santet --sumber data dan Pemda Banyuwangi-- periode Februari 1998 sampai dengan Oktober 1998, maka jumlah korban yang terbesar terjadi di kecamatan Kabat (17 orang meninggal dunia), diikuti oleh kecamatan Rogojampi (16 orang meninggal dunia). Sedangkan di kecamatan Banyuwangi hanya terdapat 1 korban jiwa meninggal dunia. Dan data di atas juga perlu dipertanyakan atau diteliti penyebabnya, karena besarnya angka kematian di atas menyebutkan angka kematian terbesar ada pada kecamatan Banyuwangi pada tahun 1999. Padahal seharusnya dari tingkat kualitas hidup kesehatan tentunya kecamatan Banyuwangi mempunyai sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan juga ditunjang dengan tingkat pendidikan yang cukup baik dibanding kecamatan lainnya. Sedangkan jika dilihat dari piramida penduduk, maka seharusnya di kecamatan Rogojampi yang memiliki 21.757 penduduk laki-laki dan 22.871 jiwa penduduk perempuan yang tergolong pada penduduk lanjut usia (lebih dan 65 tahun).



Dari tahun 1990 ke tahun 1991 dan seterusnya sampai tahun 2000, peningkatan jumlah penduduk relatif stabil, yaitu sebesar 0,24%. Dalam jangka waktu 5 tahun dan tahun 1990 sampai tahun 1995, meningkat sebesar 1,21%; dan jumlah penduduk 1.454.870 jiwa pada tahun 1990 menjadi 1.472.412 jiwa penduduk pada tahun 1995. Dalam jangka waktu 5 tahun berikutnya (1995-2000) mengalami peningkatan sebesar 1,21 persen dari jumlah penduduk 1.472.412 pada tahun 1995 menjadi 1.409.166 pada tahun 2000.

TABEL 1:

**PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI  
ANGKA SEMENTARA PROYEKSI BERDASARKAN  
HASIL SENSUS PENDUDUK 1990 TAHUN 1990-2000**

<i>Tahun</i>	<i>Banyaknya Penduduk</i>
(1)	(2)
1990	1.454.870
1991	1.458.362
1992	1.461.862
1993	1.465.370
1994	1.468.887
1995	1.472.412
1996	1.475.946
1997	1.479.489
1998	1.483.039
1999	1.486.599
2000	1.490.166

#### **4. Mutasi Penduduk**

Mutasi penduduk (keluar) yang tercatat paling banyak terjadi pada tahun 1998 adalah sebanyak 9.659 orang atau meningkat sebesar 13,58 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 1999 menurun kembali menjadi 5.775 atau 40,21 persen dibandingkan dengan tahun 1998. Dari tabel di atas dapat diketahui pula bahwa laki-laki cenderung lebih memiliki mutasi (keluar) daripada perempuan, hal ini dapat dilihat dari seluruh mutasi (keluar) yang berjumlah 5.775 orang pada tahun 1999 terdiri dari 2.912 laki-laki dan 2.863 perempuan.

Peningkatan jumlah mutasi pada tahun 1998 ini bisa dikaitkan dengan upaya penanganan dari aparat pemerintahan untuk memperkecil jumlah korban pembunuhan dukun santet. Orang-orang yang diduga sebagai dukun santet atau yang telah dilabeling masyarakat oleh aparat pemerintah setempat (pamong praja) disarankan untuk pindah dari desa setempat dan mencari pekerjaan di luar kota Banyuwangi. Data ini diperkuat dengan penurunan angka mutasi (keluar) sebesar 40,21 persen pada tahun 1999, yang berarti bahwa dengan menurunnya pembunuhan terhadap dukun santet maka mutasi (upaya

penanganan) terhadap orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet juga surut.

**Tabel:3** MUTASI PENDUDUK (KELUAR) YANG TERCATAT  
KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1999

<i>Kecamatan</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pasanggrahan	185	175	360
2. Bangorejo	20	22	42
3. Purwoharjo	30	37	67
4. Tegaldlimo	59	94	153
5. Muncar	93	34	82
6. Cluring	137	123	260
7. Gambiran	61	56	117
8. Glenmore	63	71	134
9. Kalibaru	66	63	129
10. Genteng	259	231	490
11. Srono	55	59	114
12. Rogojampi	100	81	181
13. Kabat	23	23	46
14. Singojuruh	130	127	257
15. Sempu	208	180	388
16. Songgon	169	148	317
17. Glagah	43	44	87
18. Banyuwangi	786	743	1.529
19. Giri	214	296	510
20. Kalipuro	222	236	458
21. Wongsorejo	34	20	54
<i>Jumlah</i> 1999	2.912	2.863	5.775
1998	5.168	4.491	9.659
1997	4.591	3.913	8.504

Sumber: Banyuwangi Dalam Angka, 1999

## 5. Tenaga Kerja

Ada dugaan bahwa kesibukan kerja mempengaruhi kesempatan orang melakukan aksi-aksi unjuk rasa. Komunitas yang disibukkan dengan pekerjaan cenderung tidak banyak melakukan aksi demonstrasi, dan sebaliknya.

Tabel : 4 PEMENUHAN / PENEMPATAN PEENCARI KERJA  
MENURUT JENIS KELAMIN DAN TINGKAT  
PENDIDIKAN TAHUN 1999

<i>Pendidikan</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sekolah Dasar	292	1.378	1.670
02. Sekolah Menengah Pertama	40	294	334
03. Sekolah Menengah Atas	84	52	136
04. Sekolah Menengah Ekonomi Atas	1	7	8
05. Sekolah Pertanian Menengah Atas	1	-	1
06. SMTA Sederajat	7	4	11
07. Sarjana Muda	-	-	-
08. Sarjana Penuh	11	8	19
<b>Jumlah 1999</b>	<b>436</b>	<b>1.743</b>	<b>2.179</b>
<b>1998</b>	<b>2.322</b>	<b>3.739</b>	<b>6.061</b>
<b>1997</b>	<b>1.049</b>	<b>1.122</b>	<b>2.171</b>

Sumber : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi

BANYUWANGI DALAM ANGKA 1999

Pemenuhan atau penempatan pencari kerja menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan tahun 1999 dan 2.179 orang yang terdiri dari 1.743 perempuan dan 436 laki-laki, kebanyakan berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 1.670 atau 76,64 persen yang terdiri dari 1.378 perempuan (82,51 persen) dan 292 laki-laki (17,49 persen). Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 334 orang atau 15,32 persen, Sekolah Menengah Atas sebanyak 6,24 persen atau 136 orang, Sekolah Menengah Ekonomi Atas sebesar 0,37 persen, Sekolah Pertanian Menengah Atas 0,05 persen, dan sarjana penuh (Strata 1) sebanyak 19 orang atau 0,9 persen.

Seperti terlihat dari tabel 4 di atas bahwa penduduk Banyuwangi mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi dalam hal pekerjaan. Sebagai tenaga kerja kualitas sumber daya masyarakat Banyuwangi terlalu rendah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya lulusan Sekolah Dasar yang menjadi tenaga kerja (76,64 persen).

## **6. Pendidikan**

Dengan adanya otonomi, maka dimungkinkan tidak akan adanya pembedaan atau diskriminasi antara sekolah negeri dan

yang terbaik dan mencetak hasil yang maksimal. Begitu juga masyarakat mulai cenderung mencari kualitas daripada mengikuti anggapan sekolah negeri lebih baik, seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel : 5 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID DAN GURU SD NEGERI DAN SWASTA PER KECAMATAN TAHUN 1999/2000

Kecamatan	Sekolah		Murid		Guru		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
01.Pesanggaran	81	-	9.677	-	574	-	
02.Bangorejo	43	-	5.480	-	343	-	
03.Purwoharjo	46	5	4.590	753	427	34	
04.Tegaldlimo	46	2	4.429	116	360	12	
05.Muncar	54	3	11.218	571	478	21	
06.Cluring	47	-	6.076	-	418	-	
07.Gambiran	65	2	9.425	515	550	23	
08.Clenmore	48	2	6.584	158	369	12	
09.Kalibaru	39	-	5.767	-	271	-	
10.Genteng	37	6	7.475	1.016	380	52	
11.Srono	48	-	7.327	-	398	-	
12.Rogojampi	54	1	8.574	131	398	8	
13.K a b a t	48	-	5.115	-	310	-	
14.Singojuruh	33	-	5.039	-	243	-	
15.Sempu	39	-	6.694	-	338	-	
16.Songgon	36	-	4.554	-	224	-	
17.Glagah	54	-	5.151	-	297	-	
18.Banyuwangi	50	6	9.747	1.934	444	70	
19.Ciri	16	2	2.102	240	139	18	
20.Kallipuro	30	-	2.244	-	209	-	
21.Wongsorejo	42	-	5.165	-	231	-	
<b>Jumlah</b>	<b>1999</b>	<b>956</b>	<b>29</b>	<b>132.433</b>	<b>5.434</b>	<b>7.401</b>	<b>250</b>
	<b>1997</b>	<b>956</b>	<b>26</b>	<b>135.639</b>	<b>5.218</b>	<b>7.066</b>	<b>257</b>
	<b>1996</b>	<b>956</b>	<b>28</b>	<b>138.915</b>	<b>5.318</b>	<b>7.133</b>	<b>250</b>

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa banyaknya sekolah negeri di kabupaten Banyuwangi dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 tidak mengalami peningkatan yaitu sebanyak 956 sekolah. Sedangkan untuk sekolah swasta terjadi kenaikan pada tahun 1999 sebanyak 29 sekolah atau 11,54 persen dari tahun sebelumnya. Banyaknya murid sekolah negeri dari tahun 1996 sampai tahun 1999 terus mengalami penurunan, sehingga pada tahun 1999 tercatat 132.433 atau menurun sebesar 2,36 persen. Sedangkan untuk sekolah swasta tahun 1999 meningkat sebesar 4,14 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah guru negeri mengalami peningkatan pada tahun 1999 sebanyak 7.401 orang atau 4,74 persen dari tahun sebelumnya. Untuk guru sekolah swasta, dari tahun 1996 ke tahun 1997 meningkat sebesar 2,8 persen dan kemudian pada tahun 1999 menurun kembali menjadi 250 orang guru.

Dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama jumlah sekolah negeri dari tahun 1997 ke 1998 meningkat sebesar 2,08 persen kemudian menurun kembali, sehingga pada tahun 1999 jumlahnya sebanyak 48. Sedangkan untuk sekolah swasta pada tahun 1999 mengalami penurunan sebesar 13,98 persen dari tahun

**Tabel:6 BANYAKNYA SEKOLAH, MURID DAN GURU SD NEGERI DAN SWASTA PER KECAMATAN TAHUN 1999/2000 (TIDAK TERMASUK MTs)**

<i>Kecamatan</i>	<i>Sekolah</i>		<i>Murid</i>		<i>Guru</i>	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pasanggrahan	5	6	3.730	873	157	74
2. Bangorejo	1	1	1.112	86	61	11
3. Purwoharjo	2	-	1.131	-	57	0
4. Tegaldlimo	2	3	725	211	55	32
5. Muncar	2	2	637	154	32	23
6. Cluring	2	-	589	-	47	-
7. Gambiran	3	2	2.316	188	108	26
8. Glenmore	1	1	774	53	32	10
9. Kalibaru	1	1	1.131	-	57	-
10. Genteng	3	11	2.431	1.321	86	128
11. Srono	2	6	1.037	1.487	49	73
12. Rogojampi	2	2	1.081	165	64	26
13. Kabat	4	6	1.846	566	92	92
14. Singojuruh	3	6	910	543	68	81
15. Sempu	2	2	1.133	279	51	25
16. Songgon	2	3	1.340	709	73	36
17. Glagah	2	5	1.898	838	84	57
18. Banyuwangi	3	7	1.725	1.245	95	88
19. Giri	2	4	829	943	48	48
20. Kalipuro	3	6	1.849	1.318	82	82
21. Wongsorejo	1	6	777	1.315	43	64
Jumlah 1999	48	80	29.001	12.290	1.473	976
1998	49	93	37.315	12.049	1.423	2.327
1997	48	89	22.759	13.325	1.412	1.210



Untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama negeri pada tahun 1999 menurun sebesar 22,28 persen dari tahun sebelumnya. Untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama swasta pada tahun 1999 mengalami peningkatan sebesar 2,00 persen dari tahun 1998. Sedangkan untuk guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama negeri terus mengalami mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 1999 meningkat sebesar 3,51 persen dari tahun sebelumnya. Untuk guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama swasta mengalami penurunan drastis pada tahun 1999 sebesar 58,06 persen atau 296 dibandingkan tahun 1998 yaitu 2.327 orang.

Dari tabel 6 (terlampir) dapat dilihat bahwa pada tingkat SLTA banyaknya sekolah negeri mengalami peningkatan pada tahun 1999 sebesar 7,69 persen dari tahun 1998. Untuk sekolah swasta pada tahun 1998 mengalami peningkatan dari tahun 1997 sebesar 22,22 persen atau 66 sekolah, dan pada tahun 1999 menurun menjadi 53 atau 24,52 persen dibandingkan tahun 1998. Sedangkan untuk murid sekolah negeri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari tahun 1997 ke tahun 1998 meningkat sebesar 29,67 persen dan pada tahun 1998 ketahun 1999 meningkat sebesar 1,33 persen.

Untuk murid swasta dari tahun 1997 ke tahun 1998 mengalami peningkatan drastis sebesar 180,38 persen atau dari 6.265 menjadi 17.567, kemudian pada tahun 1999 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,20 persen. Sedangkan untuk guru negeri terus menerus dari tahun ke tahun, dan dari tahun 1997 ke tahun 1998 menurun sebesar 9,84 persen dan pada tahun 1999 menurun kembali sebesar 0,59 persen dari tahun 1998. Untuk guru swasta pada tahun 1998 menurun sebesar 3,53 persen dari tahun sebelumnya, kemudian dari tahun 1998 ke tahun 1999 meningkat sebesar 5,89 persen.

## **7. Kesehatan**

Dari tabel 7 di bawah dapat diketahui bahwa sarana kesehatan terbanyak yaitu posyandu yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan rumah sakit umum pada tahun 1999 hanya terdapat 2 buah, rumah sakit khusus 1 buah, rumah sakit BUMN 2 buah, Rumah Persalinan Swasta 12 buah, Puskesmas 45 buah, Puskesmas pembantu 104 buah, puskesmas keliling 36 buah, Balai Pengobatan 42 buah, BKIA 30 buah, Apotik 21 buah, Laboratorium Medis 8 buah, dan semua

sarana kesehatan tersebut tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Tabel: 7 BANYAKNYA SARANA KESEHATAN MENURUT JENIS SARANA KESEHATAN TAHUN 1996-1999

<i>Jenis Sarana</i>	<i>1996</i>	<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)
1. RSU Pemerintah	2	2	2	2
2. RSU BUMN/Khusus	2/1	2/1	2/1	2/1
3. Rumah Bersalin Swasta	13	12	12	12
4. Puskesmas	44	44	45	45
5. Puskesmas Pembantu	103	103	103	104
6. Puskesmas Keliling	35	36	36	36
7. Balai Pengobatan BUMN	42	42	42	42
8. BKIA BUMN / Swasta	30	30	30	30
9. Posyandu	1.984	1.987	1.987	1.989
10. Apotik	19	19	21	21
11. Laboratorium Medis	3	7	7	8

Sumber: Dinas Kabupaten Banyuwangi

Tabel : 8 BANYAKNYA TENAGA MEDIS DAN TENAGA LAINNYA  
TAHUN 1996 - 1999

<i>Tenaga Medis/Tenaga lainnya</i>	1996	1997	1998	1999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Dokter Umum	50	50	53	55
02. Dokter Spesialis	20	20	23	23
03. Dokter Gigi	23	23	24	24
04. Bidan / Bidan Desa	122/98	128/98	128/98	128/98
05. Penilik Kesehatan	6	8	8	8
06. Sanitasi	12	13	13	15
07. Perawat	560	562	562	562
08. Apoteker	4	4	4	4
09. Paramedis lainnya	590	590	590	592

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KANTYAWANJI DALAM ANEKA 1999

Tabel : *g* BANYAKNYA PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU  
PER KECAMATAN TAHUN 1997 - 1999

Kecamatan	PUSKESMAS			PUSKESMAS PEMBANTU		
	1997	1998	1999	1997	1998	1999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.Pesanggaran	3	3	3	7	7	7
02.Bangorejo	2	2	2	5	5	5
03.Purwoharjo	2	2	2	4	4	4
04.Tegaldimo	2	2	2	4	4	4
05.Muncar	4	4	4	8	8	8
06.Cluring	2	2	2	5	5	5
07.Gambiran	3	3	3	7	7	7
08.Glenmore	2	2	2	6	6	6
09.Kalibaru	1	1	1	2	2	2
10.Genteng	2	2	2	4	4	4
11.Srono	2	3	3	4	4	4
12.Rogojampi	2	2	2	5	5	5
13.Kabat	2	2	2	5	5	5
14.Singojuruh	2	1	1	3	3	3
15.Sempu	3	3	3	8	8	8
16.Songgon	1	1	1	4	4	4
17.Glagah	2	2	2	5	5	5
18.Banyuwangi	2	3	3	4	4	4
19.Giri	1	1	1	2	2	2
20.Kalipuro	2	2	2	5	5	5
21.Wongsarejo	2	2	2	6	6	6
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dari tabel 9 di atas dapat disimpulkan bahwa tenaga medis dan tenaga lainnya dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti, dan dari tahun 1998 ke tahun 1999 yang meningkat hanya dokter umum sebanyak 3,77 persen dibandingkan tahun 1998, juga sanitasi yang meningkat sebesar 15,3 persen dan para medis lainnya yang naik sebesar 0,34 persen.

Sedangkan dari tabel dapat diketahui bahwa banyaknya puskesmas dan puskesmas pembantu tidak mengalami peningkatan sama sekali. Bahkan pada tahun 1998 sempat mengalami penurunan puskesmas yaitu di kecamatan Singojuruh.

## **8. Penduduk Menurut Agama**

Dari tabel 10 di bawah dapat diketahui bahwa pemeluk agama di kabupaten Banyuwangi mayoritas Islam, yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 1997 ke tahun 1998 meningkat sebesar 0,09 persen dan tahun 1998-1999 juga mengalami peningkatan yang sama besarnya, yaitu 0,09 persen. Untuk pemeluk agama yang jumlahnya paling kecil yaitu agama Budha. Pada tahun 1999, jumlah pemeluk agama

persen, Katholik sebesar 0,62 persen, Hindu sebesar 2,47 persen, dan agama Budha sebesar 0,44 persen.

Tabel : 10 BANYAKNYA PEMELUK AGAMA PER KECAMATAN TAHUN 1999

Kecamatan	Islam	Kristen/ Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.Pesanggaran	75.758	2.977	1.533	8.698	1.647	90.613
02.Bangorejo	52.225	603	439	4.499	13	57.779
03.Purwoharjo	52.962	2.489	1.197	4.608	291	61.547
04.Tegaldimo	48.573	1.215	180	5.806	482	56.256
05.Muncar	110.003	1.040	581	3.784	63	115.471
06.Cluring	66.520	797	82	79	637	68.115
07.Gambiran	93.192	1.280	720	3.291	1.105	99.588
08.Glenmore	66.258	679	790	595	25	68.347
09.Kalibaru	55.869	428	69	115	29	56.510
10.Genteng	75.464	534	475	707	116	77.296
11.S r o n o	79.885	231	168	574	187	81.045
12.Rogojampi	82.789	162	538	1.784	706	85.979
13.K a b a t	60.535	54	2	28	11	60.630
14.Singojuruh	43.898	132	58	7	9	44.104
15.Sempu	68.306	364	331	353	133	69.487
16.Songgon	48.133	221	30	250	40	48.674
17.Glagah	59.115	195	44	36	15	59.405
18.Banyuwangi	97.032	2.497	1.499	619	841	102.488
19.G i r i	26.642	277	102	42	52	27.115
20.Kalpuro	58.143	168	139	51	27	58.528
21.Wongsorejo	65.331	160	39	32	42	65.604
Jumlah	1999 1.386.633	16.503	9.016	35.958	6.471	1.454.581
	1998 1.395.367	16.376	7.549	36.243	6.251	1.451.787
	1997 1.384.067	18.495	7.705	35.223	6.688	1.452.176

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi

BANYUWANGI DALAM ANEKA 1999

Tabel : // BANYAKNYA TEMPAT IBADAH MENURUT JENISNYA  
PER KECAMATAN TAHUN 1999

Kecamatan	Masjid	Langgar/ Musholla	Gereja	Pure	Wihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.Pesanggaran	85	369	21	16	5
02.Bangorejo	72	237	8	10	-
03.Purwoharjo	64	260	17	15	3
04.Tegaldlimo	59	276	9	17	3
05.Muncar	89	303	6	7	-
06.Cluring	71	431	5	1	5
07.Gambiran	98	544	8	9	7
08.Glenmore	100	303	5	2	1
09.Kalibaru	72	288	3	1	1
10.Genteng	68	263	20	3	3
11.Srono	85	415	1	2	1
12.Rogojampi	76	419	4	5	1
13.Kabat	64	389	-	1	-
14.Singojuruh	39	273	2	2	-
15.Sempu	82	284	-	-	-
16.Songgon	69	234	2	1	1
17.Glagah	61	318	1	-	-
18.Banyuwangi	45	337	14	2	2
19.Giri	23	164	2	-	-
20.Kalipuro	76	306	-	-	-
21.Wongsorejo	56	356	1	-	-
<b>Jumlah 1999</b>	<b>1.454</b>	<b>6.769</b>	<b>129</b>	<b>94</b>	<b>33</b>
<b>1998</b>	<b>1.414</b>	<b>6.527</b>	<b>128</b>	<b>97</b>	<b>12</b>
<b>1997</b>	<b>1.414</b>	<b>6.527</b>	<b>128</b>	<b>97</b>	<b>12</b>

Sumber : Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi

BANYUWANGI DALAM ANGKA 1999



*Banyuwangi dalam Angka 1999*

**Tabel : 12 BANYAKNYA TAHANAN KEJAKSAAN NEGERI MENURUT  
JENIS PERKARA PIDANA TAHUN 1999**

<i>Jenis Perkara Pidana</i>	<i>Sisa Tahun Lalu</i>	<i>Masuk Tahun ini</i>	<i>Jumlah Tahanan Tubuh</i>	<i>Disela- saikan Tahun ini</i>	<i>Sisa Akhir Tahun</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Besar	-	723	-	723	723
02. Ekonomi	-	-	-	-	-
03. Korupsi	-	-	-	-	-
04. Subversi	-	-	-	-	-
05. Narkotik	-	-	-	-	-
06. Imigrasi	-	-	-	-	-
07. Lain-lain	-	-	-	-	-
<i>Jumlah 1999</i>	-	723	-	723	723
<i>1998</i>	-	378	378	378	-
<i>1997</i>	-	433	433	433	-

Sumber : Kejaksaan Negeri Banyuwangi

*BANYUWANGI DALAM ANGKA 1999*

Tabel : 13 BANYAKNYA TERDAKWA/TERTUDUH YANG  
DISELESAIKAN PENGADILAN NEGERI MENURUT  
JENIS PIDANA/HUKUMAN TAHUN 1997-1999

<i>Jenis Pidana/Hukuman</i>	1997	1998	1999
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Pidana Mati	-	-	-
02. Pidana Seumur Hidup	-	-	-
03. Pidana Penjara	400	532	755
04. Pidana Kurungan	-	-	-
05. Pidana Bersyarat	-	-	-
06. Pidana Denda	1	-	-
07. Pidana Tambahan	-	-	-
08. Dikembalikan kepada Orang Tua	-	-	-
09. Diserahkan kepada Pemerintah	-	-	-
10. Dibebaskan dari segala tuntutan	1	3	-
11. Dilepas dari tuntutan	-	-	-
<i>Jumlah</i>	402	535	755

Sumber : Pengadilan Negeri Banyuwangi

BANYUWANGI DALAM ANGKA 1999

Dari tabel 13 di atas diketahui bahwa tempat ibadah di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan jumlahnya, kecuali Pura. Pada tahun 1998 ke tahun 1999 jumlah Masjid yaitu 1.454 buah atau meningkat 2,83 persen, Langgar atau Musholla meningkat sebesar 3,71 persen, Gereja meningkat sebesar 0,78 persen, Wihara naik sebesar 175 persen dan jumlahnya yang hanya 12 pada tahun 1998 menjadi 33 pada tahun 1999. Sedangkan Pura mengalami penurunan dari tahun 1998 ke tahun 1999 sebesar 3,09 persen (97 menjadi 94 Pura).

## 9. Tahanan

Dari tabel 14 di bawah dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya tahanan pada tahun 1999 sebesar 723 dengan jenis perkara pidana biasa yang diselesaikan pada tahun itu juga. Jumlah tahanan paling sedikit yaitu pada tahun 1998 yaitu 378 atau menurun sebesar 12,70 persen dibandingkan dengan tahun 1998 dibandingkan tahun 1997. Sedangkan pada tahun 1999 meningkat kembali menjadi 723 atau 91,27 persen dari tahun sebelumnya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa banyaknya terpidana/terdakwa yang diselesaikan pengadilan negeri

Tabel : 14 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR  
DAN JENIS KELAMIN TAHUN 1999

Kecamatan	< 1		1 - 4		5 - 14	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.Pesanggaran	760	741	3.359	3.110	10.530	9.923
02.Bangorejo	428	434	1.927	1.876	6.373	6.222
03.Purwoharjo	318	337	1.924	2.048	6.325	6.152
04.Tegaldimo	423	382	1.907	1.763	6.448	6.035
05.Muncar	643	689	4.309	4.121	13.073	12.802
05.Cluring	521	505	4.650	2.234	7.181	7.268
07.Gambiran	736	688	3.573	3.430	11.182	10.810
08.Glenmore	868	773	4.720	4.538	14.750	14.565
09.Kalibaru	360	407	2.111	2.010	6.169	5.944
10.Genleng	463	445	2.851	2.779	8.948	8.963
11.S r o n o	493	478	2.947	2.799	8.848	8.491
12.Rogojampi	249	287	1.519	1.449	4.333	4.112
13.K a b a t	429	374	2.246	2.119	6.763	6.195
14.Singojuruh	344	344	1.607	1.590	5.023	4.812
15.Sempu	420	396	2.589	2.474	8.127	7.979
16.Songgon	388	329	1.660	1.508	5.641	5.253
17.Glagah	375	358	1.921	1.924	9.697	5.590
18.Banyuwangi	787	783	3.568	3.571	11.130	10.798
19.G i r i	152	156	1.009	913	2.840	2.661
20.Kalipuro	325	339	2.157	1.981	6.068	5.776
21.Wongsorojo	461	450	2.338	2.283	7.016	6.701
<b>Jumlah</b>	<b>9.943</b>	<b>9.695</b>	<b>54.892</b>	<b>50.520</b>	<b>166.465</b>	<b>157.052</b>

BANYUWANGI DALAM ANGKA 1999

Tabel 5 (Lanjutan halaman 38)

Kecamatan	15 - 44		45 - 64		> 65	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01. Pesanggaran	21.100	21.740	6.928	7.386	2.373	2.663
02. Bangorejo	14.006	14.270	4.420	4.652	1.542	1.638
03. Purwoharjo	15.468	16.086	4.832	5.094	1.385	1.572
04. Tegaldimo	13.812	13.993	4.375	4.379	1.274	1.465
05. Muncar	29.418	29.450	8.309	8.091	2.104	2.431
06. Cluring	15.413	17.288	5.173	5.471	1.506	1.905
07. Gambiran	23.902	25.450	7.480	7.489	2.134	2.624
08. Glenmore	31.267	34.824	11.397	12.353	2.866	3.685
09. Kuli Baru	13.939	14.337	1.435	4.924	1.140	1.429
10. Genteng	17.676	19.536	5.991	6.178	1.648	1.818
11. Srono	19.736	20.827	6.673	6.422	1.524	1.792
12. Rogojampi	10.419	11.606	3.701	3.676	21.757	22.871
13. Kabat	14.304	15.295	5.021	4.842	1.003	1.029
14. Singojuruh	10.004	10.719	3.575	3.905	1.036	1.145
15. Sempu	10.055	17.390	5.442	5.499	1.497	1.619
16. Songgon	11.268	11.922	4.102	3.855	1.022	1.726
17. Glagah	14.300	15.218	5.112	5.191	1.672	1.934
18. Banyuwangi	24.562	27.603	7.737	7.941	1.713	2.295
19. Giri	6.935	7.502	2.078	1.927	461	481
20. Kalipuro	14.818	16.284	4.440	4.183	985	1.043
21. Wongsorejo	16.502	17.485	5.054	4.743	1.118	1.451
<b>Jumlah</b>	<b>354.001</b>	<b>378.825</b>	<b>113.275</b>	<b>118.201</b>	<b>51.768</b>	<b>59.416</b>

BANYUWANGI DALAM ANGKA 1999

mengalami peningkatan. Dan tahun 1997 ke tahun 1998 meningkat sebesar 33,08 persen (402 menjadi 535), dan pada tahun 1999 meningkat lagi sebesar 41,12 persen, sehingga pada tahun 1999 jumlahnya menjadi 755. Menurut jenis pidana/hukuman yang paling banyak yaitu pidana penjara yang terus meningkat dan tahun ke tahun. Dari tahun 1997 ke tahun 1998 naik sebesar 33 persen, dan dari tahun 1998 ke tahun 1999 meningkat sebesar 41,9 persen.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

Berikut dikemukakan hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari beberapa item pertanyaan penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab Pendahuluan. Karena itu, uraian dimulai sesuai dengan urutan item-item pertanyaan penelitian.

#### **3.1. Latar Belakang membela mati-matian terhadap Presiden Gus Dur**

Jika diamati, sejak kemunculan era reformasi, tengah terjadi kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di masyarakat. Sebagian orang berupaya berjuang menegakkan demokoratisasi melalui pemberdayaan dan atau penguatan masyarakat sipil. Sebagian yang lain juga sedang melakukan pemaksaan-pemaksaan kehendak tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Apa yang tengah terjadi pada masyarakat yang tengah bertransisi ini bisa jadi memang sedang mengalami pergulatan nilai, bentuk dan model

melalui proses sosial yang panjang menuju ke tatanan sosial yang demokratis ataukah justru membuahakan suatu masyarakat yang bertatanan penuh kekerasan; kacau dan anarkisme.

Memperhatikan fenomena yang sedang berkembang dalam masyarakat, terutama ketika melihat bagaimana perilaku pendukung Gus Dur dengan segera menyimpulkan kalau mereka itu antidemokrasi. Alasannya, cukup sederhana, yakni melakukan aksi-aksi pengerahakan massa yang sangat besar di jalan-jalan, sampai harus beramai-ramai datang ke Jakarta. Tuduhan seperti ini semakin diyakini ketika ada gerakan Pasukan Berani Mati (PBB) di Banyuwangi dan Surabaya. Kecenderungan perilaku pendukung Gus Dur pada tataran ini mempermudah atau memberikan peluang kepada orang untuk semakin membenarkan tuduhan sebelumnya bahwa warga nahdliyin yang selama ini dikenal dan terkenal dengan sifat dan sikap nya yang toleran dan demokratis ternyata tidaklah selalu benar.

Selain itu, juga banyak orang memberikan komentar lain. Misalnya, bagaimana mungkin terjadi kontradiksi di uinternal NU sendiri. Gus Dur selama ini dikenal sebagai pejuang demokrasi karena ia memang seorang demokrat tulen. Bahkan label seperti ini



diperkuat dengan didirikannya Forum Demokrasi (Fordem) dimana Gus Dur sebagai penggagas sekaligus pemimpinnya. Tetapi mengapa perilaku pendukungnya (grassroot) tidak atau setidaknya kurang mempertimbangkan kaidah-kaidah perilaku yang demokratis? Inilah kontradiksinya. Ada apa sebetulnya?

Betulkah fenoeman seperti itu menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara wacana, sikap dan cara berpikir elit-elit NU dan ummatnya? Atau kalau mau introspeksi, inilah yang selama ini menjadi kelemahan NU? Jika memang ini kelemahan NU, kelemahan inilah yang tengah dimainkan oleh politisi non-NU untuk menghancurkan, atau setidaknya menjatuhkan nama dan kredibilitas nama besar NU baik di mata umat, masyarakat, nasional dan bahkan internasional. Inilah sumber dan akar persoalannya, kata salah seorang putra kyai yang cukup brilian pemikirannya di Banyuwangi.

Selanjutnya, ia kemukakan bahwa "program penjatuhan" Gus Dur tidak hanya diniatkan untuk tujuan politik, melainkan lebih dari itu. "Musuh-musuh" Gus Dur, adalah juga "musuh-musuh NU". Karena ketika Gus Dur menjadi presiden, dalam pandangan mereka, inilah saatnya menjatuhkan dan memporak-porandakan

nama Gus Dur yang menjadi simbolisasi NU. Dan mereka kelihatannya betul-betul memanfaatkan momentum itu dengan baik.

Dalam analisisnya dikemukakan bahwa Gus Dur dijadikannya presiden. Kalau dia mau efektif menjalankan fungsi kepresidenannya, ia harus mendapat dukungan parlemen. Sementara disadari betul, kalau parlemen yang ada sebagian besar bukan pendukung Gus Dur. Ini artinya, Gus Dur akan memerintah namun dengan kendali parlemen. Sebab, kalau Gus Dur mau sukses, logikanya tidak akan berani macam-macam, tanpa mendapat dukungan dan atau persetujuan parlemen. Dan, para musuh Gus Dur ini tahu betul kalau Gus Dur tidak pernah mau "didekte" oleh parlemen; sehingga para musuh Gus Dur di parlemen akan dengan gampang menjatuhkan Gus Dur dengan berbagai alasan. Dan, menurutnya, itulah yang kemudian benar-benar terjadi.

Target pertama, menjatuhkan Gus Dur, sudah berhasil. Target berikutnya, dan dicapai dalam masa bersamaan, pelibatan pendukung Gus Dur untuk ikut terpancing terlibat dalam proses politik praktis. Sebab, para musuh Gus Dur tersebut mengetahui

benar bagaimana pola kepemimpinan dan tipologi masyarakat (komunitas) kaum nahdliyin yang paternalistik dan cenderung monomorphik. Kalau pimpinannya, katakanlah Kyainya, diganggu, maka akan dengan segera ummatnya tidak akan rela dan membelanya mati-matian. Dan inilah yang terjadi.

Target ketiga, mendeskreditkan jam'iyah NU. Sebab, sejak Muktamar Situbondo, NU telah bertekad untuk khitah. Berarti tidak akan terlibat dalam politik praktis. Namun, dalam konteks kasus kejatuhan Gus Dur, NU sebagai organisasi, disengaja atau tidak, langsung atau tidak langsung terpancing untuk terlibat dan melibatkan diri dalam dunia politik praktis. Sebab, bagaimana seorang PB NU, Ketua Wilayah sampai ke Cabang NU, bahkan juga sampai ke Ranting NU di desa-desa harus secara aktif menasehati, memberikan bimbingan dan bahkan terpaksa harus mendampingi jamaahnya yang akan melakukan demonstrasi membela Gus Dur. Lebih dari itu, secara tak terelakkan para elit NU harus berjuang memberikan klarifikasi-klarifikasi tentang perilaku jamaahnya yang berdemonstrasi membela Gus Dur. Semuanya itu menempatkan para elit NU untuk berada di posisi dan situasi sulit sehingga mau

tidak mau ikut terseret dan terpancing pula dalam dunia politik praktis, meski acap ditegaskan secara tegas tidak berpolitik praktis.

Diakhir pendapatnya, ia menyatakan bahwa itu semuanya yang menyebabkan mengapa para pendukung Gus Dur itu sangat jengkel dan marah-marah terhadap para "musuh Gus Dur" yang juga berarti "musuh NU". Dan karena faktor ini pulalah mengapa mereka ini sangat militan memberia Gus Dur mati-matian.

Sementara itu, menurut penjelasan seorang Kyai yang relatif masih muda mengatakan bahwa Jawa Timur ini merupakan pendukung utama Presiden Abdurrahman Wahid. Hal ini wajar saja, sebab pendukung Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah tokoh Nahdlatul Ulama (NU), seorang Kyai, dan berasal dari Jawa Timur dimana warga Nau-nya paling banyak di seluruh Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang Kyai di Banyuwangi bahwa bagi kita (maksudnya, warga NU), Gus Dur bukan sekedar presiden Republik Indonesia. Beliau, juga seorang Kyai. Presiden yang Kyai, dan Kyai yang Presiden. Karena itu, kita semestinya menghormatinya tidak hanya beliau sebagai presiden, melainkan juga sebagai seorang Kyai. Harus *double* hormatnya, katanya.

Tetapi, apa yang terjadi sekarang? Bagaimana orang-orang itu (maksudnya, para elit politik seperti Amin Rais, Fatwa, dan orang-orang partai di DPR) memperlakukan Gus Dur? Bagaimana Gus Dur didholimi oleh mereka-mereka<sup>1</sup> yang kebelet berkuasa? Bagaimana Gus Dur "dikuyo-kuyo" oleh orang-orang semacam elit politik hanya karena mereka takut terkena gebrakan penegakan hukum yang akan dilakukan Gus Dur?

Pada hal, mereka-mereka juga yang menjadikan Gus Dur sebagai presiden. Namun, mereka juga yang sekarang paling aktif (sponsor) menjatuhkan Gus Dur? Itu semua hanya akal-akal dari orang-orang yang licik dan hanya berpikiran kepada kekuasaan saja. Mereka ini tidak mau berpikir dan memikirkan nasib rakyat yang masih mengalami krisis dan kemiskinan. Yang diomongkan setiap hari hanya bagaimana agar Gus Dur jatuh, apapun mereka lakukan. Pada hal mereka itu mengaku sebagai partai Islam, atau berasal dari orang yang sama-sama beragama Islam. Apa ya begitu sikap sebagai orang Islam mendholimi sesama Islamnya. Atau mungkin, semangat Islam sudah hilang sama sekali, kalau sudah ada dalam kekuasaan ya, tanyanya.

---

<sup>1</sup> Informan sering menggunakan kata "mereka" untuk menyebut para elit politik, khususnya dari Poros Teneah yang dulu meniadakan Gus Dur Presiden

Sementara itu, salah seorang tokoh pemuda Banyuwangi yang selama pemerintahan Gus Dur melakukan aksi demonstrasi pembelaan mengemukakan bahwa

Ya harus membela, sebab Gus Dur itu seorang Ulama dan Kyai besar. Namanya tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, melainkan juga internasional. Bahkan Gus Dur juga menjadi salah satu pengurus organisasi agama-agama dunia. Apalagi Gus Dur itu tokoh NU pusat, kiblat semua umat nahdliyin Indonesia. Lha, kalau beliau diolok-olok dan diejek-ejek seperti itu, sebagai warga NU, siapa yang nggak sakit dan ikut terhina.

Tokoh pemuda seperti itu, bukan hanya mewakili dirinya sendiri. Apa yang mereka katakan sangat mungkin juga menjadi pikiran dan dialami oleh kebanyakan pemuda yang menjadi umat nahdliyin. Sebab, beberapa pemuda lain, seperti pemuda yang tergabung dalam organisasi Ansor, dan apalagi Garda Bangsa mempunyai paham yang sama. Bahkan secara tegas-tegas berani membela mati-matian terhadap eksistensi Gus Dur sebagai presiden. Seperti dikemukakan oleh salah seorang pemuda Ansor berikut:

"Gus Dur bagi saya, adalah simbol ke NU an dan ke Kyai an. Kalau simbol jamaah diganggu dan diolok-olok sampai keterlaluan, maka kami-kami ini merasa ikut diolok-olok dan

dihina. Sehingga tanpa dipeintah dan tanpa instruksi pun kami siap membelanya, apapun resikonya ...”

Agak berbeda dengan pandangan dua pemuda sebelumnya, salah seorang Fatayat yang juga sering ikut melakukan aksi unjuk rasa membela Gus Dur menuturkan bahwa

“Kita membela Gus Dur itu, bukan semata-mata karena beliau seorang Kyai dan presiden, melainkan juga Gus Dur itu berasal dari Jawa Timur. Dan Jawa Timur, sebagaimana diketahui menjadi pusat warga NU tinggal. Karena itu, kalau saya membela Gus Dur bukan saja karena beliau itu presiden, kyai, tetapi juga simbol Jawa Timur. Dan, berbicara Jawa Timur berarti juga bisacara NU dan kyai ...”

Dari beberapa pendapat di atas kelihatan bahwa faktor primordialisme dan kolektifitas komunitas kelompok cukup berperan dan karena itu bisa menjelaskan mengapa warga nahdliyin, khususnya pendukung Gus Dur, begitu militan membelanya. Meski alasannya sebagian sama dan sebagian lain berbeda, namun perbedaannya tidak begitu signifikan.

### **3.2. Pandangan terhadap demokrasi dan *civil society*.**

Semua informan yang ditemui tidak mempermasalahkan dengan pembangunan demokrasi di Indonesia. Bahkan sebagian di

antara mereka berani mengatakan “wajib” dilakukannya demokratisasi di masyarakat. Sebab, pengalaman menunjukkan bagaimana sengsaranya kalau negara ini dipimpin secara otoriter.

Islam, melalui *Fiqh Siasyah*, juga mempunyai ketentuan bagaimana mengelola masyarakat secara demokratis. Bahkan nabi Muhammad sendiri juga merupakan pemimpin yang demokratis. Karena itu, mereka sangat setuju dan mendukung sekali adanya pembangunan demokrasi di masyarakat. Dengan adanya demokrasi di masyarakat, rakyat akan bisa menyarakan aspirasinya kepada pemerintah, dan pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat. Kalau tidak, berarti pemerintah mengingkari amanat yang diberikan rakyat kepada para pejabat, kata salah seorang aktifits putri dari Fatayat NU.

Sementara itu, informan lain yang juga pimpinan Banser di Genteng mengatakan bahwa

Saya mendukung pemerintahan yang demokratis. Bahkan, demokrasi itu sendiri harus dididikkan kepada semua anggota masyarakat agar setiap warga negara mengetahui apa-apa yang menjadi haknya, dan apa pula kewajibannya. Demikian pula, juga harus dididikkan kepada semua aparat pemerintah, mulai dari aparat di tingkat desa sampai ke menteri. Saya membayangkan, kalau semua warga negara dan aparatnya mengetahui, memahami dan melaksanakan ajaran demokrasi



yang baik dan benar, maka damai lah negara ini dan tenteram lah kehidupan masyarakat. Tapi yaitu, syaratnya semua orang, khususnya para aparat negara itu harus menjadi contoh bagaimana demokrasi itu ...”

Senada dengan informan dari anggota Banser tersebut, salah seorang putra kyai yang namanya cukup dikenal luas di Banyuwangi mengatakan bahwa demokrasi itu perlu diketahui semua warga negara, khususnya para pejabat negara yang diamanati rakyat mengelola masyarakat. Kalau pejabatnya tidak tahu demokrasi, atau tahu tetapi berperilaku tidak demokratis, maka akan kacau. Apalagi, jika sampai memanfaatkan “kata demokrasi” justru untuk kepentingan mereka sendiri. Ini yang sangat berbahaya. Seperti yang terjadi sekarang ini.

Negara ada dan diadakan sesungguhnya untuk melayani kepentingan dan kebutuhan warga negara. Semua kebijakan negara adalah kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Namun, yang terjadi selama pemerintahan rezim orde baru tidaklah demikian. Kebijakan negara yang diintroduksi ke masyarakat melalui instrumen birokrasi negara justru sebaliknya. Merugikan dan bahkan mengeksploitasi rakyat. Kenyataan ini menunjukkan bahwa fungsi praktis jawatan pemerintah secara keseluruhan

adalah untuk kepentingan politik. Hasil hubungan yang yang hirarkis antara pejabat pemerintah dengan masyarakat tercermin dari sikap paternalis pemerintah dengan sistem pemusatan kekuasaan yang digunakan. Pelaksanaan kebijaksanaan dan peraturan ditingkatkan dari atas dan penempatannya dilakukan tanpa pertimbangan lebih lanjut serta tanpa partisipasi dari pihak yang bersangkutan. Melihat kondisi semacam ini, maka inovasi pemerintah dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada.

Rakyat tidak dapat menuntut perubahan terhadap sistem pemerintahan mereka karena takut akan tekanan dari pemerintah. Berbagai kebijaksanaan pemerintah diputuskan oleh para pelaksana negara. Andil masyarakat hanya sebatas surat pembaca yang ditujukan kepada redaksi media massa serta partisipasi mereka dalam Pemilihan Umum yang proses pelaksanaannya sudah direkayasa setiap lima tahun. Tekanan-tekanan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah dibawah bendera reformasi dihapuskan, dan kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah dianggap sebagai suatu bentuk ketidaksetiaan atau bahkan subversif. Pemerintah berpusat di Jakarta dan disebarkan melalui sejumlah besar kantor wilayah berbagai departemen.

Kebijaksanaan dan pendanaan juga diformulasikan di pusat, dengan para abdi negara yang dibatasi kebebasan otonominya baik di tingkat provinsi maupun daerah (Anlov, 1999: 28-49).

Indonesia sekarang ini dapat dikatakan sedang berada di suatu persimpangan jalan. Indonesia telah mengalami berbagai kesempatan yang jarang dan sangat bernilai historis dalam proses perubahan sistem pemerintahannya demi menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya diabad mendatang. Dalam usahanya beralih dari rezim yang otoriter dan terpusat menjadi pemerintahan sipil yang bertanggung jawab, pemerintahan baru di Indonesia sekarang ini dapat dikatakan sedang menuju titik kritis. Dewasa ini tantangan yang dihadapi Indonesia lebih besar daripada dukungan yang diperolehnya untuk membuat sistem pemerintahan yang efisien, partisipatif, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang harus dilakukan sekarang adalah berusaha untuk lebih memperkenalkan sistem pengambilan keputusan, perumusan kebijaksanaan, dan ketetapan pemerintah kepada masyarakat melalui desentralisasi.

Salah seorang informan, yang sering menjadi penggerak unjuk rasa membela Gus Dur, mengemukakan bahwa selama ini

kebijakan pemerintah itu umumnya dari atas. Rakyat jarang diberi tahu. Tahu-tahu ada program dari atas, dan rakyat harus melaksanakannya. Kalau tidak, ada ancamannya. Apakah seperti ini yang disebut negara demokrasi?

Selanjutnya ia mengemukakan pendapatnya, bahwa

Di jaman nabi, kita mengenal masyarakat Madaniyah, yakni masyarakat yang dibangun nabi secara demokratis di Madinah. Mengapa disebut Madaniyah karena di kota inilah bertemu beberapa kelompok, atau etnis, suku, pemukim asli dan pendatang (Muhajirin). Meskipun masyarakatnya begitu beragaman latar belakangnya, namun nabi Muhammad berhasil menyatukannya dengan pengelolaan yang demokratis. Model masyarakat seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai tipologi masyarakat Madaniyah. Istilah Madaniyah ini, kalau di barat disebut dengan *civil society*.

Masyarakat madani, menurut salah seorang komentator yang berpengaruh, adalah "bentuk masyarakat tertentu, yang menghargai perbedaan sosial dan mampu membatasi tindakan penghapusan oleh kekuatan politik" (Hall, 1995: 25). Kelompok semacam ini muncul pertama kali di Eropa, dan dapat "dengan bantuan faktor keberuntungan, keterampilan, dan imajinasi", menyebarkan ke beberapa daerah lain di dunia. Keanekaragaman dari organisasi sukarelawan yang secara bersama-sama cukup kuat untuk mencegah tindakan kekerasan. Termasuk dalam kelompok

masyarakat madani adalah kelompok gerakan-gerakan sosial, kelompok pengamat, kelompok penganut berbagai ideologi, dewan gereja, persatuan kebudayaan, kelompok debat, para cendeki, asosiasi pekerja, persatuan buruh, bahkan olahraga. Di samping itu mestinya termasuk juga partai-partai politik, tetapi saya memilih untuk meletakkannya di luar lingkup masyarakat madani, karena tujuan utama mereka adalah bukan untuk membatasi kekuasaan negara, tetapi lebih cenderung untuk bersaing demi memperoleh kekuasaan.

Masyarakat madani kurang lebih berhubungan erat dengan masalah perbedaan dalam masyarakat dan toleransi. Istilah ini oleh karena bertentangan dengan pokok utama pemilikan moralitas tunggal (betapapun luhurnya), sebagai pendukung, misalnya nilai-nilai luhur Pancasila yang akan ditentang. Masyarakat madani merupakan bentuk kelompok masyarakat yang memiliki keseimbangan yang kompleks antara konsensus dan konflik, dan konflik atas cara pandang tidak boleh dihindarkan. Hidup dalam keanekaragaman sama pentingnya dengan istilah masyarakat madani itu sendiri sebagai pengendali kesewenang-wenangan yang sedang berlangsung sekarang ini. Keanekaragaman ini juga harus

menjunjung tinggi nilai individunya, atau yang terjadi adalah munculnya masyarakat baru yang akan menjadi sekeras masyarakat sebelumnya, sehingga demokrasi dapat menjadi "tidak madani" (seperti dalam beberapa kasus pembersihan stnik di India dan Bosnia). Contohnya dapat kita lihat dalam kelompok masyarakat Amerika dan Eropa Barat yang menganggapnya lebih sebagai tujuan utama mereka untuk menjatuhkan pemerintah, setelah diliputi berbagai keraguan akan institusi publik yang ada, dan sepenuhnya menginginkan untuk kembali kepada keluarganya, meninggalkan yang miskin dan tidak beruntung dengan tujuan untuuk memagari diri mereka sendiri. Lebih lanjut, Ernest Gellner menyatakan bahwa terdapat banyak organisasi nonpemerintah yang sama sewewenang-wenangnya dengan negara, "segmen-segmensosial beberapa kelompok masyarakat primordial yang religius dan yang terlalu ritual budi luhur, dapat secara sosial menyerap, serta secara dalam menuntut dan melumpuhkan" (Gellner, 1995:41)." Komunitas yang kharismatik yang melihat tugasnya di bumi sebagai pewujud kebenaran yang mutlak"(Gellner, 1995:49) ini tidak mewakili suatu masyarakat madani. Persatuan dalam masyarakat madani harus dibentuk

secara bebas dan mampu mempromosikan keanekaragaman yang ada, dan bukan ditentukan baik atas dasar kelahiran maupun ritual yang mengesankan. Persatuan dalam masyarakat madani harus diwujudkan dalam debat yang tetap satu sama lain (hal ini berkaitan erat dengan istilah Habermas tentang lingkungan publik).

Peran terpenting masyarakat madani adalah untuk membatasi kekuasaan negar dan memastikan bahwa kebijaksanaan umum adalah untuk kepentingan mereka yang paling membutuhkan. Kita harus mengatur masyarakatmadani dan sistem pemerintahan umum dengan cara mengekang yang kuat dn melindungi yang lemah, yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang berlaku, yang menyediakan sistem pemeriksaan dan penyetaraan yang menjamin kebijaksanaan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab. Pihak yang berkuasa harus dipaksa meminta pertanggungjawabannya oleh hukum, melalui pengadilan yang independen dan otonom serta melalui kekuasaan tambahan yang lain (seperi partai-partai politik , masyarajat madani, pers, kelompok negosiasi, dan sebagainya).

Munculnya masyarakat madani (civil Society) berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia civil society muncul sebagai bentuk

gerakan kebangkitan rakyat melawan dominasi militer di era orde baru. Di Eropa Timur Civil Society dipandang sebagai perjanjian demokratis untuk membebaskan warga negara dari sistem totaliter dan bentuk sistem sosial, politik dan ekonomi baru untuk memungkinkan bagi pengembangan sebuah masyarakat yang mandiri<sup>2</sup>

Di Singapura civil society di kemukakan Goh Tjok Tong di awal pemerintahannya sebagai antisipasi atas kuatnya tuntutan kebebasan rakyat yang lebih besar terutama kebebasan politik (Ismiyatun, 2000). Namun, gerakan civil society yang dicoba bangun oleh pemerinatahan Goh Tjong Tong di Singapura kemudian dikritik berbagai kalangan karena Civil Society tidak dipandang sebagai sebuah power sharring, tetapi hanya sebagai perubahan gaya pemerintahan yang berusaha membuat keseimbangan terhadap perkembangan tuntutan keterbukaan yang lebih luas (Chua Beng Huat, 1997).

Kadang hal tersebut dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang bagus. Penting untuk diingat disini bahwa pemerintahan yang bagus tidak harus dihubungkan dengan efisiensi aparat

---

<sup>2</sup> Hikam, AS. *Demokrasi dan Civil Societv*. (Jakarta: LP3ES). 1996. halaman 82



pemerintahnya, tetapi juga partisipasi, tanggungjawab dan keterbukaan aparatnya. Suatu pemerintahan dapat menjadi efektif dalam penentuan kebijaksanaannya tanpa andil dan keterbukaan. Beberapa sistem yang dianut di Asia bahkan membuktikan bahwa sistemnya dapat menjadi lebih efektif dengan bantuan negara yang kuat meskipun tanpa adanya tanggung jawab dan keterbukaan. Indonesia, misalnya, selama beberapa dekade terakhir tampak efisien dalam dalam peningkatan ekonominya.

Oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk memperkuat masyarakat yang madani. Bagaimana cara kita untuk melakukannya? Dalam artikel yang menarik beberapa tahun yang lalu, Victor Perez-Diaz menjabarkan sebuah contoh:

Pertama-tama kita dapat mencoba mempromosikan berbagai institusi dan dan berbagai pengertian yang menyediakan kesepakatan prosedural dalam menyelesaikan perdebatan yang akan difokuskan pada usaha pengurangan penggunaan kekerasan fisik. Kedua, kita dapat mengajarkan nilai pengertian historis akan masa lalu yang mengurangi kekakuan hubungan antara bangsa dan negara...., Ketiga, kita dapat mencoba memfokuskan perhatian kita pada pembuat kebijaksanaan, serta pendapat masyarakat tentang masalah praktis perwujudan dan pemberian jaminan terhadap hak masyarakat minor nasional maupun etik..., Keempat, kita paling tidak dapat memberi semangat kepada mereka yang rela berkorban demi perwujudan keinginan untuk memberi

dukungan dan toleransi eksperimentasi dan institusional dan kulturak melalui dwi dan multiidentitas kolektif. (Perez-Diaz, 1995: 89).

Kesempatan tumbuhnya masyarakat yang madani dan sektor non pemerintah di Indonesia sekarang paling besar. Tuntutan terhadap peningkatan andil masyarakat, keterlibatan masyarakat dan mitra kerja swasta dan pemerintah sekarang semakin kuat. Sejalan dengan diberlakukannya politik kelompok dan individu di Indonesia sekarang ini, tujuan utama kita adalah memastikan bahwa masalah kewarganegaraan dan partisipasi umum dijadikan sebagai prioritas politik utama bagi kontrak sosial baru yang dibentuk.

Dalam melihat persoalan masyarakat madani (*civil society*), perlu digunakan 2 tataran, *pertama*, tataran institusional-sosiologis dan *kedua* tataran ideal menyangkut visi. Akar *civil society* di Indonesia sudah ada, seperti lembaga-lembaga *ntermediatory* sekalipun masih sangat sederhana antara masyarakat dan negara, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Yang perlu dikembangkan pada lembaga ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuannya agar lebih rasional sehingga bisa membangun dan mengembangkan jaringan dengan kelompok-kelompok lembaga

lain. Lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah adalah contoh akar-akar dari *civil society* (Hikam (1999)).

Pada tataran visi, barangkali agak mengalami kesulitan. Sebab, visi dari *civil society* menuntut adanya kesediaan menyerap nilai-nilai dari Barat (seperti Enlightenment, rasionalitas, sekularisasi dan nilai-nilai demokrasi yang sangat humanitarian) yang dalam banyak hal masih dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal (agama). Harus diakui memang ada perbedaan-perbedaan, namun –agar produktif—yang dicari adalah persamaan-persamaannya, seperti prinsip *enlightenmen* dicarikan persamaan dengan prinsip *al-ushul al-khamsah dalam fiqh*. Dengan mencari titik pertemuan dan persamaan yang terjadi adalah sinergi antara Islam (lokal) dan Barat. Karena itu upaya mengembangkan masyarakat madani seperti jaman nabi akan menutup kemungkinan terjadi sinergi dan pencangkakan pada hal kondisi riil di masyarakat sangat heterogen.

Sementara itu, berbicara tentang *civil society* berarti perlu memperhatikan *enlightenmen*, dan ini berarti juga perlu membicarakan sekularisasi. Pada hal sampai kepada *civil society* diperlukan pencerahan pada lembaga-lembaga tradisionalnya tanpa

meninggalkan akar-akarnya. Pada tataran institusi tradisional (seperti pesantren, Subak, Lumbung Desa) ada 2 level, yakni visi dan institusi.

Secara umum konsep civil society bermakna (tersirat) bahwa suatu rejim berhak menjalankan otoritasnya di atas wilayah dan warga negara yang berada di dalam kekuasaannya setelah pemerintah mendapatkan legitimasinya dari warga negara atau penduduknya. Sebaliknya, warga negarapun berperan aktif di dalam politik dengan menjalankan fungsi *check and balance* bagi pemerintah baik melalui legislatif maupun LSM.

Masyarakat secara umum berkecenderungan bergerak secara dinamis dan kemudian akan berubah. Perubahan sosial yang terjadi memungkinkan masyarakat yang semula sangat sederhana karena urbanisasi, industrialisasi, mobilitas penduduk, perpindahan agama, interaksi antar etnis dan menguatnya birokrasi-militer kemudian akan mengalami perbesaran struktur sosial secara vertikal (*social gap*) maupun horisontal (*social differentiation*). Kian melebarnya jarak sosial vertikal dan horisontal ini secara tak terelakkan akan menyebabkan ketidakpuasan-ketidakpuasan (konflik laten) baik pada tingkat individu, komunitas maupun masyarakat. Situasi

demikian pada gilirannya akan menghasilkan kerawanan-kerawanan terhadap konflik dan kerusuhan yang bereskalasi sangat besar. Dengan kata lain masyarakat yang tengah mengalami perubahan sosial dengan cepat akibat pembangunan menyebabkan kian tercerai-berainya ikatan-ikatan tradisional (*malintegration*).

### **3.3. Pengalaman Berorganisasi dan Militansi**

Hampir semua informan adalah menjadi anggota, bahkan pengurus organisasi sosial keagamaan, (Nahdlatul 'Ulama). Mereka ada yang di Banser (Barisan Serba Guna), Fatayat, Anshor, bahkan PKB (partai Kebangkita Bangsa). Sebagai organisasi sosial keagamaan, sudah tentu semangat dan motivasi serta perilakunya disemangati oleh nilai-nilai organisasi keagamaannya. Karena itu, wajar kalau kemudian banyak dipahami berbagai pihak perilaku jamaah NU di Indonesia, khususnya, sangat toleran dan menerima masyarakat plural. Karena toleran dan menjunjung tinggi pluralitas masyarakat, maka sudah tentu kalau sangat mendukung pembangunan demokratisasi.

Paling tidak demikian itulah kesan dan pemahaman banyak orang tentang warga Nahdliyin di Indonesia, khususnya di Jawa

Timur. Akibat pemahaman seperti itu, maka banyak kalangan bersimpati dan *respect* terhadap jamaah nahdliyin, terutama dari komunitas-komunitas minoritas di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa ketika Gus Dur menjadi presiden, banyak kaum minoritas di Indonesia sangat mendukungnya.

Pertanyaannya yang kemudian banyak muncul adalah mengapa perilaku pendukung Gus Dur, khususnya di Jawa Timur bertindak anarkis, jika memang itu perilaku pendukungnya Gus Dur? Namun, dari luar setidaknya itulah kesan yang mereka terima dari media massa. Kalau betul pendukung Gus Dur itu selama ini dikenal sebagai warga negara yang toleran, menghargai perbedaan pendapat dan menunjung tinggi pluralitas pemikiran, pendapat dan keragaman masyarakat, mengapa secara tiba-tiba berperilaku “melawan hukum” dan “tidak prosedural” –menggunakan jalur DPR yang ada, jika memang mempunyai kehendak dan tuntutan? Mengapa mereka ini lebih senang rame-rame turun ke jalan secara demonstratif sehingga mengganggu kepentingan banyak orang? Pertanyaan terhadap pendukung Gus Dur ini masih terbuka untuk diteruskan ...

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa semua informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sangat mendukung demokratisasi. Dan, mereka juga memahami kalau demokrasi di Indonesia itu sedang dilakukan, atau masih dalam proses belajar. Sehingga wajar kalau masih banyak kekurangannya. Namun, yang mereka tidak setuju kalau "menyalahgunakan" kata demokrasi "memanfaatkan" momentum sedang belajar berdemokrasi dan "memperalat" demokrasi untuk kepentingan politik dan kekuasaan.

Tujuh informan dari 9 informan yang ditanya mengemukakan hal seperti itu. Menurut mereka, apa yang sekarang (ketika pemerintahan Gus Dur) adalah seperti itu.

### **3.5. Peran tokoh agama dalam membangun civil society dan demokratisasi**

Ada pertanyaan menarik yang kini banyak muncul di kalangan masyarakat lapis bawah: para tokoh agama, betulkah mereka itu bisa menjadi sponsor (utama) terhadap demokratisasi dan pewujudan masyarakat madaniyah (civil society)? Jika berperan, dalam apa dan bagaimana peran itu ditunjukkannya?

Terhadap pertanyaan seperti itu, para informan umumnya menjawab sangat bisa dan dalam beberapa hal tidak bisa.

Disebutkan sangat bisa, dalam artian sangat berperan karena mereka itu adalah pimpinan, sekaligus panutan umat. Sehingga apapun nasehatnya akan diikuti umat. Termasuk sikap, perilaku dan pemikirannya (pendapatnya) akan diteladani jamaahnya. Karena itu, dalam hal ini, tergantung bagaimana nasehat dan perilaku pemimpin agama tersebut. Kalau sudah bicara masalah pemimpin, segala sesuatunya kembali kepada karakteristik sang pemimpin dan komitmennya kepada umat.

Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan yang juga putra seorang ulama di Banyuwangi bahwa posisi atau status pemimpin agama, katakanlah kyai, itu sangat berat. Berbeda dengan pemimpin masyarakat biasa (bukan kyai), seorang kyai itu segala gerak-geriknya menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat menganggap seorang kyai itu cerminan sebuah moralitas agama. Karena itu, segala sikap, perilaku dan tindak-tanduknya dianggap mencerminkan moralitas agama. Bukankah para kyai itu merupakan pewaris nilai para *ambiya'* (*warisatul ambiya'*? Itulah beban yang disandang oleh seorang kyai. Kyai, katanya, suatu jabatan yang sangat berat, meski tidak ada bayaran dari umat.



Kalau seorang kyai, berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agama, meski sedikit saja menyimpang, akan dengan segera dikomentari, disosoti dan dijadikan gunjingan banyak orang. Jadi, segala sesuatunya, gerak-geriknya, penamopilannya, cara ngomongnya, sikapnya, dan hal-hal lain akan secara langsung diperhatikan masyarakat. Sungguh sangat berat dan serba tidak enak menjadi kyai. Ibarat "dipenjara" oleh umat. Tapi yang itulah resiko menjadi pimpinan umat, katanya.

Namun, justru karena itulah peran seorang kyai sangat besar dalam mewarnai umatnya. Kalau ia berperilaku sebagaimana diajarkan agama, maka dengan segera, apa saja yang menjadi nasehatnya akan diikuti umatnya. Termasuk, nasehat, ajaran, petuah dan ajakannya melakukan pembangunan demokrasi. Tidak sekedar ajakan-ajakan atau nasehatnya. Bahkan performance dan perilaku kesehariannya akan secara langsung menjadi acuan masyarakat. Bagaimana pak kyai itu dalam memimpin jamaahnya, memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan jamaah dan bagaimana keputusan di jamaahnya diambil adalah beberapa contoh yang bisa langsung diamati dan ditiru oleh anggota jamaah. Disinilah peran besarnya.

Informan dari Fatayat, juga mengatakan bahwa para ulama (termasuk kyai) adalah panutan umat. Kalau ulama telah berperilaku demokratis maka akan ditiru langsung demokratis pula oleh masyarakat. Selanjutnya, ia mengatakan

Ulama itu adalah pilihan orang. Maksudnya, tidak semua orang bisa menjadi ulama, apalagi kyai. Sebab, seorang kyai itu harus mumpuni, mempunyai komitmen tinggi terhadap umat, tidak mempunyai pamrih material dan segala sesuatunya semata-mata demi penegakan kebenaran serta demi kemaslahatan umat. Selain itu, seorang kyai itu adalah pewaris para nabi. Bisa dikatakan kalau kyai itu merupakan perwujudan (representasi?) jiwa kenabian. Kalau demikian, maka semangat dan jiwa kenabian nabi Muhamad dalam membangun masyarakat Madaniyah akan juga dilakukan oleh para kyai itu ... dan saya yakin betul masyarakat akan mengikutinya.

Meski menyetujui kedua informan di atas, seorang aktifis demonstrasi pendukung Gus Dur yang satu ini, banyak mengkritisi kiprah ulama, terutama sejak 10 tahun terakhir. Ia mengemukakan bahwa sangat setuju dengan begitu pentingnya peran ulama (kyai) dalam pembangunan demokratisasi. Tetapi harus diingat siapa dan bagaimana sepak terjangnya dulu, tanyanya.

Sebab, ia menilai sekarang ini banyak orang mengaku-aku ulama dan kyai. Mereka ini memang pintar mengaji dan umumnya juga pondokan. Tetapi, sikap dan perilakunya kurang, untuk

mengatakan tidak, mencerminkan jiwa seorang ulama, apalagi kyai. Sudah menjadi rahasia umum, dengan menyebut beberapa contoh ulama, atau kyai yang seperti ia katakan, mereka ini mengaku-aku kyai, dan biar diakui keulamaannya dan kekyaiannya membangun atribut-atribut, seperti membangun masjid, membuat pesantren, berpakaian "ala" kyai terkenal, dst. Pada hal semuanya itu karena mereka mempunyai kepentingan tertentu. Kepentingan? Ya, kepentingan politik, kepentingan materi dan kepentingan lain. Kalau orang seperti ini, mana bisa disebut ulama, apalagi seorang kyai. Dan, bagaimana bisa ulama atau kyai seperti bisa berperan dalam pembangunan dan kemaslahatan umat, termasuk membangun dan memberikan contoh demokratisasi kepada masyarakat. "Wong dirinya saja kayak gitu , mana orang percaya ...", tanyanya lagi.

Ia sangat setuju dengan pendapat, bahkan keyakinan banyak orang bahwa pimpinan agama bisa berperan penting dalam perwujudan demokrasi di masyarakat. Yakin karena posisi kyai itu sangat strategis. Tetapi, dengan cepat ia menjelaskan, harus kyai yang beneran!! Apa itu, ya kyai yang dfalam perjuangannya tidak mempunyai pamrih apa-apa, semuanya dilakukan semata-memata

karena keihlasan dan atas keridloan Tuhan. Ia juga, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kondisi umat. Konsisten dengan ajaran nabi. Tidak *menda-mende*, kalau benar dikatakannya benar karena sesuai dengan ajaran agama; bukan, benar dibuat abu-abu karena ada kepentingan politik ...". Ia juga bertanggungjawab betul terhadap jamaahnya; bukan malah meminta sumbangan terus kepada jamaah. Selain itu, ia juga memberikan tauladan dan contoh langsung kepada umat dalam segala hal, sebelum ia mengatakannya. Jadi yang ia sampaikan adalah apa yang ia sudah kerjakan dan rasakan. Nah, kyai seperti inilah yang betul-betul diidamkan oleh umat. Dan jika kyainya seperti ini, *wistalah* ... apapun yang ia kehendaki dan ajak-kan ke umat akan segera diikutinya. Bahkan, tanpa ia meminta saja, semua orang akan mengikutinya.

## **BAB IV**

# **P E N U T U P**

---

### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil wawancara, dan analisis sebagaimana dikemukakan pada bab tiga, ditarik kesimpulan bahwa

- Massa pendukung (mantan) presiden Gus Dur melakukan aksi-aksi yang dinilai banyak kalangan sebagai anarkis sebagai produk dari kejengkelan terhadap elit politik yang menurukan Gus Dur dengan cara-cara yang justru dinilainya mengatasnamakan, memanfaatkan celah-celah dan "menciderai" nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, agresifitas dan "anarkisme" pendukung Gus Dur adalah produk dari pemahaman elit politik yang dinilai memperlakukan demokrasi secara salah semata-mata karena dorongan kepentingan politik sesaat.
- Faktor simbolisasi Gus Dur, selain dipandang sebagai representasi NU, juga status kepresidenannya, dalam banyak hal ikut berperan mendorong pendukung Gus Dur melakukan aksi unjuk rasa membelanya.

- Massa pendukung Gus Dur sangat setuju dan bahkan mendukung gerakan demokratisasi dan pewujudan civil society selain karena hal itu juga menjadi bagian dari ajaran agama, juga berdasar pengalaman dari sistem pemerintahan yang otoriter yang ternyata menyengsarakan rakyat kecil.
- Para tokoh agama, Kyai, dipandang bisa menjadi pelopor demokratisasi dan pewujudan civil society sejauh mereka bisa berposisi dan berperan sebagaimana Kyai yang seharusnya. Posisi strategis Kyai seperti inilah yang sangat membantu gerakan demokratisasi di kalangan masyarakat lapis bawah
- Pengalaman keorganisasian sosial keagamaan hampir tidak banyak menunjukkan kaitan langsung dengan aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan pendukung Gus Dur.

## **2. Rekomendasi**

Unjuk rasa pendukung Gus Dur yang banyak disorot banyak kalangan, utamanya media massa, sebagai anarkis dan main hakim sendiri serta tidak demokratis tidak akan pernah terjadi kalau perilaku elit politik tidak “memprovokasi”-nya. Boleh dikatakan, aksi-aksi anarkis pendukung Gus Dur adalah produk, reproduksi dan atau resonansi dari olah elit politik yang

Sehubungan dengan itu, maka mengingat tipologi masyarakat Indonesia masih *paternalistik* dan meski mengaku masyarakat demokratis, namun dalam banyak hal masih berorientasi kepada *monomorphik leadership*, maka tanggungjawab moral, konsistensi dan komitmen elit politik terhadap rakyat masih sangat diperlukan. Ketidakkonsistenan elit negara akan dengan segera dirujuk oleh rakyat. Itulah sebabnya mengapa perilaku elit negara, elit agama dan tokoh masyarakat pada lapisan manapun dan apapun perlu harus dilakukan dalam konteks dan orientasi kepentingan rakyat.

## Kepustakaan

- Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Hidayah), 1999
- Etzioni (1968), *The Active Society*. New York: The Free Press.
- Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: CV. Rajawali, 1979.
- Darmawan Salman, "Protes Petani dan Integrasi Pedesaan, Tinjauan Umum Era Orde Baru", dalam *Prisma*, No. 7, 1996.
- Arendt, Hannah, *Asal Usul Totalitarianisme*. (Jakarta: Yayasan Obor), 1995
- Budiman, Arief, "Bentuk Negara dan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan", dalam *Prisma*, No. 7, 1982
- Budiman, Arief, dkk, *Harapan dan Kecemasan: Menatap Arah Reformasi Indonesia*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing), 2000.
- Bulkin, Farhan, "Negara, Masyarakat dan Ekonomi" dalam *Prisma*, No. 8 tahun 1984
- Daniel Theodore Sparringa, "Masa Depan Indonesia: Sebuah Analisis Wacana tentang Perkembangan Civil Society", *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Tahun XII, No. 4, Oktober 199, 15-24.
- Donnel and Schmitter, *Transitions from Authoritarian rule: Tentative Conclusion about Uncertain Democratics*. John Hopkins University Press: 1986) in Goran Hyden, *Op.Cit.* hal. 10
- Drum, Ani, "On Partisipation in Political Protest Movements". *Journal of Aplled Behaviour Science*. 10. 181-207
- Fatton, *Predatory Rule: The State and Civil Society in Africa*, Lyne Rienner Publishe (co Boulder) in Goran Hyden, hal. 10
- Grouch, dalam Arief Budiman (ed), *State and Civil Society in Indonesia*. Glen Waverley, 1990.